



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2025 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan Dokumen LKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP pada dasarnya adalah laporan kinerja pelaksanaan kerja untuk mencapai sasaran indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. LKIP sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2025 sesuai dengan dokumen Resntara yaitu 1) Meningkatnya Penemuan Kasus Tuberkulosis dengan target 95 2) Meningkatnya Cakupan 9 Layanan Intervensi Stunting dengan target 62 3) Menurunnya Angka Kematian Ibu dengan target 101 4) Meningkatnya 4 (empat) Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi pada RS Rujukan Regional Provinsi dengan target 25. Realisasi kinerja IKU Dinas Kesehatan pada Tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.071.638.341.515,00 dengan realisasi anggaran sebesar 99,23% atau sebesar Rp. 1.063.380.679.497,00.

Demikian Gambaran umum dari laporan ini, semoga dapat bermanfaat dalam penentuan kebijakan Pembangunan Kesehatan di Provinsi Banten.

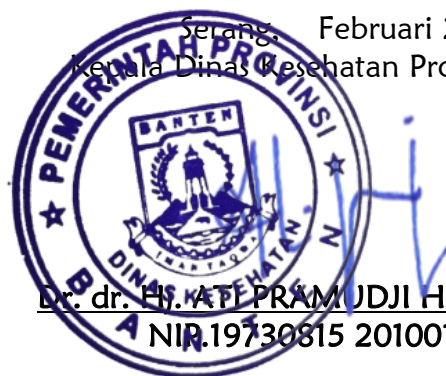
KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2025 dapat tersusun. Dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan dari penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam melaksanakan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja (Renja) yang telah dibuat dan Perjanjian Kinerja (Perkin) yang telah ditandatangani.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan motivasi kerja bagi Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Kami menyadari bahwa LKIP ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyusunannya, maka saran dan kritik sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan.

Serang, Februari 2026
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten



Dr. dr. H. APL PRAMUDJI HASTUTI, MARS
NIP.19730815 201001 2 005

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
1.5 Isu-Isu Strategis.....	28
1.6 Sistematika Pelaporan	30

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2025–2029	33
2.2 Rencana Kerja 2025	41
2.3 Perjanjian Kinerja 2025	53

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan	67
3.1.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	72
3.1.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	92
3.1.3. Membandingkan Realiasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Dinas Kesehatan	110
3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan	
Capaian Kinerja Nasional	122

3.1.5. Analisis Penyebab/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	124
3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	125
3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	126
3.2 Realisasi Anggaran	122
BAB 4 PENUTUP	141
4.1 Kesimpulan	141
4.2 Saran dan Rekomendasi	141

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Surat Pernyataan telah di Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Tahun 2025 oleh Inspektorat Daerah Provinsi Banten
- Penghargaan Atas Capaian Kategori Provinsi Terbaik dalam Capaian Indikator Tuberkulosis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Penghargaan Dalam Capaian Triple Eliminasi HIV (Skrining HIV dan Sifilis pada Ibu Hamil) dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV di Indonesia

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Distribusi Pegawai di Dinas Kesehatan (Induk) Provinsi Banten Tahun 2025.....	21
Tabel 1.2 Distribusi Pegawai di UPTD Labkesda Provinsi Banten Tahun 2025.....	22
Tabel 1.3 Distribusi Pegawai di UPTD Pelatihan Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2025.....	24
Tabel 1.4 Distribusi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum (RSUD) Banten Tahun 2025.....	25
Tabel 1.5 Distribusi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum (RSUD) Malingping Tahun 2025.....	26
Tabel 1.6 Distribusi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum (RSUD) Muhammad Irsyad Djuwaeli Labuan dan RSUD Uwes Qorny Cilograng Tahun 2025.....	27
Tabel 1.7 Distribusi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum (RSUD) Uwes Qorny Cilograng Tahun 2025.....	27
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Banten Berdasarkan RENSTRA 2025-2029	36
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	37
Tabel 2.3 Program Unggulan Dan Program Turunan Kepala Daerah Dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2025-2029	39
Tabel 2.4 Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025.....	41
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan	54
Tabel 2.6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan (RENSTRA 2023 – 2026)	55
Tabel 2.7 Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan Tahun 2025 (RENSTRA 2025 – 2029).....	61

Tabel 3.1	Nilai dan Kategori Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	68
Tabel 3.2	Matrik PKO.....	69
Tabel 3.3	Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ..	70
Tabel 3.4	Predikat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO).....	71
Tabel 3.5	Interpretasi Predikat PKO	72
Tabel 3.6	Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2025.....	73
Tabel 3.7	Capaian Penemuan Dan Pengobatan Tuberkulosis Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2025	75
Tabel 3.8	Capaian Penemuan Dan Pengobatan Tuberkulosis Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2024	75
Tabel 3.9	Capaian Penemuan Dan Pengobatan Tuberkulosis Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2023	76
Tabel 3.10	Tabel Rasio Kematian Ibu	78
Tabel 3.11	Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting	80
Tabel 3.12	Jumlah Kematian Bayi (0 – 11 Bulan) per Kabupaten / Kota Tahun 2025	85
Tabel 3.13	Jumlah Kematian Balita (12 – 59 Bulan) per Kabupaten / Kota Tahun 2025	86
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Program Dinas Kesehatan Tahun 2025 (RENSTRA 2023 – 2026)	87
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Program UPT RSUD Banten Tahun 2025 (RENSTRA 2023 – 2026).....	89
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Program UPT RSUD Malingping Tahun 2025 (RENSTRA 2023 – 2026).....	90
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Program UPTD RSUD M. Irsyad Djuwaeli Labuan Tahun 2025 (RENSTRA 2023 – 2026)	91

Tabel 3.18	Capaian Kinerja Program UPTD RSUD Uwes Qorny Ciligrang Tahun 2025 (RENSTRA 2023 – 2026)	92
Tabel 3.19	Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025	93
Tabel 3.20	Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024	94
Tabel 3.21	Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023	94
Tabel 3.22	Capaian Kinerja Program Tahun Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2024 dan 2025 (Renstra 2023-2026)	99
Tabel 3.23	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan (RENSTRA 2023 – 2026	110
Tabel 3.24	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan (RENSTRA 2025 – 2029)	117
Tabel 3.25	Umur Harapan Hidup Provinsi Banten	122
Tabel 3.26	Perbandingan Capain Indikator Tujuan Daerah dengan Capaian Nasional.....	123
Tabel 3.27	Alokasi Pagu Dinas Kesehatan Tahun 2025	127
Tabel 3.28	Realisasi Belanja Tahun 2025.....	127
Tabel 3.29	Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Tahun 2025..	129

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	STOK Dinas Kesehatan Provinsi Banten 20
Gambar 2	Cascading Dinas Kesehatan 29
Gambar 3	Sumber Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah..... 70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam satu tahun anggaran. Penyusunan LKJiP ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan Menyusun laporan kinerja sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dinas Kesehatan Provinsi Banten sebagai perangkat daerah mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, khususnya dalam meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat melalui Upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tantangan pembangunan kesehatan, seperti penurunan angka stunting, peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menuntut pengelolaan kinerja yang terencana, terukur, dan berorientasi hasil. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian kinerja melalui penyusunan LKJiP menjadi yang sangat penting.

LKJiP Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2025 memuat informasi mengenai Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Laporan ini juga menjadi instrument evaluasi untuk menilai

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan serta pemanfaatan sumber daya, sekaligus sebagai dasar perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas perencanaan pada tahun berikutnya.

Melalui penyusunan LKJiP ini diharapkan dapat terwujud akuntabilitas kinerja, transparansi pengelolaan program Kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan yang berdampak nyata bagi Masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran oleh setiap instansi pemerintah dalam periode waktu tahun tertentu dengan indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah:

1. Memberikan gambaran kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan Dinas Kesehatan Provinsi Banten secara jelas, transparan, dan akuntabel;
2. Wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran selama tahun 2025 yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan;
3. Mendorong Dinas Kesehatan Provinsi Banten di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang harus dicapai pada tahun 2025;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam penerapan azas professional, transparan, dan akuntabel.

1.3 Dasar Hukum

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja, terdapat Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri PAN RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
15. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan adalah merupakan unsur pelaksana di bidang kesehatan pada Pemerintah Provinsi Banten, yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi Banten melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi Banten memiliki 6 Unit Pelaksana Tugas (UPTD) yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

melaksanakan kegiatan teknis operasional daa/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan, yaitu RSUD Banten, RSUD Malingping, RSUD Muhammad Irsyad Djuweali Labuan, RSUD Uwes Qorny Ciligrang, UPTD Pelatihan Kesehatn, dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) Pasal delapan (8) Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2022, Dinas Kesehatan Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi;
3. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi;
4. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi;
5. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi;
6. Penerbitan Pengakuan Pedangan Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK);
7. Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
8. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi;
9. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventik Tingkat Daerah Provinsi; dan

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Dinas Kesehatan;
2. Menetapkan rencana kerja Dinas Kesehatan;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
4. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
5. Merumuskan penyelenggaraan:
 1. Pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat;
 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan;
 3. Sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman;
 4. Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan.
6. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

7. Menyelenggarakan Pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan; dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 1. Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 2. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
 3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
 5. Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, Pelayanan Administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Kesehatan;
 6. Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 7. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

8. Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
9. Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
10. Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
11. Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
12. Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Menyelenggarakan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program dan Kegiatan di lingkungan Dinas;
15. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administrative kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Dinas;
16. Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaak tugas Sekretaiat; dan
17. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 1. Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 2. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 5. Menyelenggarakan, mengedalikan dan mengevaluasi:
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat Daerah Provinsi;
 - b. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Daerah Provinsi.
 6. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 7. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administrative dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 8. Menyelenggarakan Pengelolaan kinerja, evaluasi dan laporan bidang;
 9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:

1. Kepala Seksi Mutu dan Pelayanan Kesehatan Primer; dan
2. Kepala Seksi Mutu dan Pelayanan Kesehatan Rujukan.

4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

- a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Kerja Strategis Dinas;
 - b. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang;
 - e. Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi;
 2. Pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi; dan

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi.
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
- g. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administrative dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Dinas;
- h. Menyelenggarakan Pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:

1. Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; dan
2. Kepala Seksi Kesehatan Jiwa dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat.

5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- a. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam rangka merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

- b. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Bidang;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang;
- e. Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
- g. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administrative dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Dinas;
- h. Menyelenggarakan Pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada Bidang; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
membawahkan,

- 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular; dan
- 2. Kepala Seksi Pengelolaan Imunisasi, Surveilans, Kekarantinaan dan Penyehatan Lingkungan.

6. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan

- a. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Startegis Dinas;
 - b. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Bidang;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang;
 - e. Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - 1. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi;
 - 2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi;
 - 3. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK); dan

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

4. Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisioanal (UKOT).
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
- g. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administrative dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Bidang; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan membawahkan:

1. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
2. Kepala Seksi Ketahanan Produksi, Distribusi, Pengawasan Alat Kesehatan, Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian.

7. Jabatan Fungsional dan Pelaksana

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Provinsi Banten terdiri atas:

a. UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unit organisasi bersifat khusus atau UOBK pada Dinas Kesehatan yang memberikan layanan secara professional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah serta kepegawaian. Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

penatausahaan barang milik daerah. UPTD RSUD dipimpin oleh seorang Direktur dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. Pertanggungjawaban dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian RSUD yang dapat digunakan untuk sinkronisasi pencapaian hasil Pembangunan Kesehatan Daerah.

UPTD RSUD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan pelayanan medis dan nonmedis;
2. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
3. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
5. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
6. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
7. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten diklasifikasikan UPTD RSUD Kelas B, sedangkan UPTD RSUD Malingping, UPTD RSUD Muhammad Irsyad Djuwaeli Labuan, dan UPTD RSUD Uwes Qorny Ciligrang diklasifikasikan UPTD RSUD Kelas C.

Susunan Organisasi UPTD RSUD Kelas B yaitu UPTD RSUD Banten terdiri atas:

1. Direktur;
2. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
 - Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan; dan
 - Bidang Penunjang Pelayanan;

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

3. Wakil Direktur Sarana Prasarana, Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan:
 - Bidang Sarana dan Prasarana; dan
 - Bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan.
4. Wakil Direktur Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan, membawahkan:
 1. Bagian Administrasi, Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.
5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Susunan Organisasi UPTD Kelas C yaitu UPTD RSUD Malingping, UPTD RSUD Labuan, dan UPTD RSUD Ciligrang terdiri atas:

1. Direktur;
2. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;
3. Bidang Medis;
 - a. Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan; dan
 - b. Seksi Pelayanan Medis dan Gawat Darurat.
4. Bidang Penunjang, membawahkan Seksi Etika, Mutu, Kerjasama dan Pengembangan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

UPTD RSUD membentuk Komite, Satuan Pengawas Internal, dan Instalasi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tentang tata Kelola internal RSUD.

b. UPTD PELATIHAN KESEHATAN

UPTD Pelatihan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. UPTD Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

Kesehatan di bidang pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Sumber Daya Manusia kesehatan dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, UPTD Pelatihan Kesehatan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPTD;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPTD;
3. Pelaksanaan kerja sama nasional maupun internasional di bidang Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Kesehatan dan Masyarakat;
4. Pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
5. Pengembangan metode dan teknologi pelatihan, pemantauan, evaluasi, sistem informasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
6. Penyiapan pengembangan kemitraan;
7. Pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan; dan
8. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pelaporan dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD, dan.
9. Melaksanakan tugas teknis dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

UPTD Pelatihan Kesehatan diklasifikasikan UPTD Kelas A.
Susunan Organisasi UPTD Pelatihan Kesehatan terdiri atas:

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

3. Seksi Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu;
4. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan
5. kelompok jabatan fungsional.

c. UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan dan kalibrasi. Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi:

1. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPTD;
2. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPTD;
3. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat;
4. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pemeriksaan laboratorium kimia kesehatan dan lingkungan;
5. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan rujukan pemeriksaan laboratorium klinik, laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium kimia kesehatan dan lingkungan;
6. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan kalibrasi;
7. Pelaksanaan kegiatan operasional pengendalian mutu;
8. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pelaporan dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD; dan

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

jenis Jabatan, yaitu Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional. Jabatan Struktural terdiri dari Jabatan Struktural Eselon II/a, Esselon II/b, Eselon III/a, Esselon III/b, Eselon IV/a, serta Jabatan Fungsional Umum (Staf/Pelaksana). Sedangkan Jabatan Fungsional antara lain dokter, perawat, bidan, apoteker , dll.

Komposisi pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, UPTD Labkesda, UPTD Upelkes, UPTD RSUD Malingping dan UPTD RSUD Banten, UPTD RSUD Muhammad Irsyad Djuwaeli, dan UPTD RSUD Uwes Qorny sampai dengan Tahun 2025 menurut status kepegawaian, Jabatan, Strata dan tingkat pendidikan formal sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1
Distribusi Pegawai di Dinas Kesehatan (Induk)
Provinsi Banten Tahun 2025**

NO	Jenis Tenaga	Jumlah	%
1.	Status Pegawai		
	1. ASN (PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu)	261	100
	Jumlah	261	100,00
2.	Jenis Kelamin		
	1. Perempuan	124	47,51
	2. Laki-laki	137	52,49
3.	Jabatan		
	1. Eselon II	1	0,4
	2. Eselon III	4	1,5
	3. Eselon IV	9	3,4
	4. Fungsional Penyetaraan (Eselon IV)	6	2,3
	5. Pelaksana ASN	261	100
	Jumlah	261	100,0
4.	Strata Pendidikan		
	1. Doktor (S3)	2	0,77
	2. Magister (S2)	40	15,33
	3. Strata 1 (S1) & Diploma IV	144	55,17

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

NO	Jenis Tenaga	Jumlah	%
	4. Diploma III	6	2,30
	5. SLTA / Umum	64	24,52
	6. SMP	4	1,53
	7. SD	1	0,38
	Jumlah	261	100,00
5.	Jenis Pendidikan		
	1. Doktoral	2	0,77
	2. Magister Kesehatan	20	7,66
	3. Magister Non Kesehatan	20	7,66
	4. Dokter Umum	3	1,15
	5. Dokter Gigi	2	0,77
	6. Apoteker	5	1,92
	7. Sarjana Kesehatan Masyarakat	40	15,33
	8. Sarjana Kesehatan lainnya	23	8,81
	9. Sarjana non kesehatan	71	27,20
	10. D3 Kesehatan	4	1,53
	11. D3 Non Kesehatan	2	0,77
	12. SLTA / Umum	64	24,52
	13. SMP	4	1,53
	14. SD	1	0,38
	Jumlah	261	100,00

Sumber data : Subbag Umum & Kepegawaian Dinkes Prov Banten

Tabel 1.2
Distribusi Pegawai di UPTD Labkesda
Provinsi Banten Tahun 2025

NO	Jenis Tenaga	Jumlah	%
1.	Status Pegawai		
	1. ASN	78	89,66
	2. Non ASN (Tenaga Ahli dan Penugasan Khusus)	9	10,34
	Jumlah	87	100,00
2.	Jenis Kelamin		
	1. Perempuan	39	44,83

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

NO	Jenis Tenaga	Jumlah	%
	2. Laki-laki	48	55,17
	Jumlah	87	100,00
3.	Jabatan		
	1. Eselon II	-	
	2. Eselon III	1	1,15
	3. Eselon IV	3	3,45
	4. Fungsional Penyetaraan (Eselon IV)	9	10,34
	5. Pelaksana ASN	65	74,71
	6. Tenaga Ahli +Penugasan Khusus	9	10,34
	Jumlah	87	100,00
4.	Strata Pendidikan		
	1. Doktor (S3)	-	
	2. Magister (S2)	7	8,05
	3. Spesialis	2	2,30
	4. Strata 1 (S1) & Diploma IV	37	42,53
	5. Diploma III	13	14,94
	6. Diploma I/SLTA / Umum	26	29,89
	7. SLTP	2	2,30
	Jumlah	87	100,00
5.	Jenis Pendidikan		
	1. Doktoral		
	2. Magister Kesehatan	4	4,60
	3. Magister Non Kesehatan	3	3,45
	5. Dokter Spesialis	2	2,30
	4. Dokter Umum	1	1,15
	5. Dokter Gigi	-	
	6. Apoteker	2	2,30
	7. Sarjana Kesehatan Masyarakat	5	5,75
	8. Sarjana Kesehatan lainnya	8	9,20
	9. Sarjana non kesehatan	21	24,14
	10. D3 Kesehatan	11	12,64
	11. D3 Non Kesehatan	2	2,30

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

NO	Jenis Tenaga	Jumlah	%
	12. Diplomal/SLTA/ Umum	26	29,89
	13. SLTP	2	2,30
	Jumlah	87	100,00

Sumber data : Sub bagian umum dan kepegawaian Dinkes Provinsi Banten

**Tabel 1.3
Distribusi Pegawai di UPTD Pelatihan Kesehatan
Provinsi Banten Tahun 2025**

NO	Jenis Tenaga	Jumlah	%
1.	Status Pegawai		
	ASN	18	100
	Jumlah	18	
2.	Jenis Kelamin		
	1. Perempuan	7	38,89
	2. Laki-laki	11	61,11
3.	Jabatan		
	1. Eselon II		
	2. Eselon III (b)		
	3. Eselon IV	3	16,67
	4. Fungsional Penyetaraan (Eselon IV)		
	5. Pelaksana ASN	15	83,33
	Jumlah	18	
4.	Strata Pendidikan		
	1. Doktor (S3)		
	2. Magister (S2)	1	5,56
	3. Strata 1 (S1) & Diploma IV	9	50,00
	4. Diploma III	6	33,33
	5. SLTA / Umum	2	11,11
	Jumlah	18	
5.	Jenis Pendidikan		
	1. Doktoral		
	2. Magister Kesehatan		
	3. Magister Non Kesehatan	1	5,56
	4. Dokter Umum	1	5,56
	5. Dokter Gigi		
	6. Apoteker		
	7. Sarjana Kesehatan	1	5,56
	8. Sarjana Kesehatan lainnya	1	5,56
	9. Sarjana non kesehatan	6	33,33
	10. D3 Kesehatan	5	27,78

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

NO	Jenis Tenaga	Jumlah	%
	11. D3 Non Kesehatan	1	5,56
	12. SLTA / Umum	2	11,11
	Jumlah	18	100

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinkes Provinsi Banten

Tabel 1.4
Distribusi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum
(RSUD) Banten Tahun 2025

No	Jenis Tenaga	Jumlah	%
1	Status Pegawai		
	1. ASN (PNS, PPPK dan PPPK PW)	870	78,80
	2. Non ASN (BLUD dan Tugsus)	234	21,20
	Jumlah	1.104	
2	Jabatan		
	1. Esselon II/b	1	0,09
	2. Esselon III/a	1	0,09
	1. Esselon III/b	6	0,54
	2. Esselon IV	-	
	3. Pelaksana ASN	862	78,08
	4. Pelaksana Non ASN	234	21,20
	Jumlah	1.104	
3	Strata Pendidikan Profesi ASN		
	1. Dokter Spesialis	33	3,83
	2. Dokter Umum dan Gigi	18	2,09
	3. Perawat	292	33,87
	4. Bidan	99	11,48
	5. Tenaga Kesehatan Lainnya	124	14,39
	6. Tenaga Umum	296	34,34
	Jumlah	862	
4	Strata Pendidikan Profesi Non PNS		

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

No	Jenis Tenaga	Jumlah	%
	1. Dokter Spesialis	25	10,68
	2. Dokter Umum	30	12,82
	3. Dokter Gigi		
	4. Perawat	126	53,85
	5. Bidan	1	0,43
	6. Tenaga Kesehatan Lainnya	36	15,38
	7. Tenaga Umum	16	6,84
	Jumlah	234	
	Jumlah Total	1.104	

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian RSUD Banten

Tabel 1.5
Distribusi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum
(RSUD) Malingping Tahun 2025

No	Jenis Tenaga	Jumlah	%
1	Status Pegawai		
	1. ASN	329	85,01%
	2. Tenaga BLUD	52	13,44%
	2.1. Tenaga Penugasan Khusus	6	1,55%
	Jumlah	387	100,00%
2	Jabatan		
	1. Esselon II/b	0	0,00%
	2. Esselon III/a	1	0,26%
	3. Esselon III/b	1	0,26%
	4. Esselon IV	7	1,81%
	5. Pelaksana ASN	320	82,69%
	6. Pelaksana Non ASN	58	14,99%
	Jumlah	387	100,00%
3	Strata Pendidikan Profesi ASN		
	1. Dokter Spesialis	12	3,75%
	2. Dokter Umum dan Gigi	9	2,81%
	3. Perawat	112	35,00%
	4. Bidan	29	9,06%
	5. Tenaga Kesehatan Lainnya	52	16,25%
	6. Tenaga Umum	106	33,13%
	Jumlah	320	100,00%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

No	Jenis Tenaga	Jumlah	%
4	Strata Pendidikan Profesi Non ASN		
	1. Dokter Spesialis	14	24,14%
	2. Dokter Umum	1	1,72%
	3. Dokter Gigi	0	0,00%
	4. Perawat	20	34,48%
	5. Bidan	4	6,90%
	6. Tenaga Kesehatan Lainnya	9	15,52%
	7. Tenaga Umum	10	17,24%
	Jumlah	58	100,00%
	Jumlah Total	387	100,00%

Sumber data: Sekretariat RSUD Malingping

Tabel 1.6
Distribusi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum
(RSUD) Muhammad Irsyad Djuwaeli Labuan
Tahun 2025

NO	JENIS TENAGA	RSUD M IRSYAD DJUWAEI LABUAN			
		PNS	NON PNS (BLUD)	PNS (%)	NON PNS (BLUD) (%)
1	Pejabat Struktural	8	0	88,89	0
2	Dokter Spesialis	0	17	0,0	4,84
3	Dokter Umum dan Gigi	0	24	0,0	6,84
4	Perawat	1	140	11,11	39,89
5	Bidan	0	26	0,0	7,41
6	Tenaga Kesehatan Lainnya	0	69	0,0	19,66
7	Tenaga Umum	0	75	0,0	21,37
	Jumlah	9	351	100	100

Sumber data: Sekretariat RSUD M Irsyad Djuwaeli Labuan

Tabel 1.7
Distribusi Pegawai di Lingkungan RSUD Uwes Qorny Ciligrang
Tahun 2025

NO	JENIS TENAGA	RSUD UWES QORNY CILOGRANG			
		PNS	NON PNS (BLUD)	PNS (%)	NON PNS (BLUD) (%)
1	Pejabat Struktural	8	0	80%	0
2	Dokter Spesialis	0	19	0	5,54%
3	Dokter Umum dan Gigi	0	19	0	5,54%
4	Perawat	0	133	0	38,78%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

5	Bidan	0	26	0	7,58%
6	Tenaga Kesehatan Lainnya	0	67	0	19,53%
7	Tenaga Umum	2	79	20%	23,03%
Jumlah		10	343	100%	100%

Sumber data: Sekretariat RSUD Uwes Qorny Ciligrang

1.5 Isu - Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan kesehatan di Provinsi Banten dirumuskan berdasarkan analisis kondisi kesehatan masyarakat, capaian indikator kinerja, serta arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten. Isu-isu strategis ini menjadi dasar dalam penetapan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), serta Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Adapun isu-isu strategis yang menjadi fokus Dinas Kesehatan Provinsi Banten antara lain sebagai berikut:

1. Belum Meratanya Derajat Kesehatan Masyarakat

Masih terdapat disparitas derajat kesehatan antarwilayah di Provinsi Banten yang dipengaruhi oleh perbedaan akses terhadap pelayanan kesehatan, kondisi sosial ekonomi, dan lingkungan. Isu ini berkaitan langsung dengan sasaran RPJMD dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2. Tingginya Risiko Kematian Ibu dan Bayi

Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih menjadi prioritas utama. Tantangan meliputi kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, sistem rujukan, serta faktor keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan penanganan medis.

3. Percepatan Penurunan Stunting

Stunting merupakan isu strategis nasional dan daerah yang memerlukan intervensi terintegrasi lintas sektor. Dinas

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

Kesehatan berperan dalam pelaksanaan intervensi spesifik guna mendukung target penurunan prevalensi stunting sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

4. Beban Ganda Penyakit Menular dan Tidak Menular

Masih tingginya kasus penyakit menular seperti tuberkulosis serta meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular menuntut penguatan upaya promotif, preventif, deteksi dini, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan.

5. Keterbatasan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Belum meratanya pembangunan rumah sakit di Provinsi Banten, yang hingga saat ini lebih banyak di daerah Tangerang Raya. Dukungan pembangunan jalan di daerah yang jauh dari perkotaan dan sarana transportasi yang terbatas juga menjadi salah satu penyebab keterbatasan masyarakat mengakses sarana Kesehatan yang berkualitas.

Isu-isu strategis tersebut menjadi dasar penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang selaras dengan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, serta Perjanjian Kinerja, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.

GAMBAR 2 CASCADING DINAS KESEHATAN

CASCADING KINERJA DINAS KESEHATAN

GUBERNUR SEKDA ASDA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Tujuan : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
	Indikator Kinerja Tujuan: Indeks Modal Manusia
	Indikator Kinerja : Usia Harapan Hidup
	Indikator Kinerja : Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada BALITA
KEPALA DINAS KESEHATAN	Sasaran Strategis : Meningkatnya Penemuan Kasus Tuberkulosis Meningkatnya Cakupan 9 Layanan Intervensi Stunting Menurunnya Angka Kematian Ibu Meningkatnya 4 (empat) Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi pada RS Rujukan Regional Provinsi
	Indikator Kinerja : Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage - %)
	Persentase Cakupan 9 Layanan Intervensi dalam Penurunan Stunting
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)
	Persentase 4 (empat) Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi yang Berklasifikasi Utama

Casecading atau pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawali struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Konsep pohon kinerja mengadopsi konsep model logis yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang sering digunakan untuk menganalisis prose/tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai outcome/kinerja yang diinginkan.

Dalam Menyusun pohon kinerja, yang diperlukan oleh instansi pemerintah adalah mengubah alur berfikir logis dari sebuah skema model logis, yang awalnya dimulai dari input dan berakhir mencaji outcome, menjadi dimulai dari outcome yang diinginkan dan berakhir pada input.

1.6 Sistematika Laporan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjuan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi, casecading dan proses bisnis dinas kesehatan

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan sasaran strategis organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan capaian analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencpaaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub aba ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen perjanjian kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran

- Perjanjian Kinerja Kepala Dinas
- Surat Pernyataan telah direview oleh Inspektorat
- Penghargaan-penghargaan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Perencanaan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten disusun dengan berpedoman pada visi dan misi Pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten. Dalam rangka mendukung pencapaian visi daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025 - 2029, memuat Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang menjadi dasar dalam penetapan program yang ada pada setiap perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten.

VISI “BANTEN MAJU, ADIL MERATA TIDAK KORUPSI”

Kondisi yang dicita-citakan di masa 5 (lima) tahun mendatang mengandung arti yaitu :

1. Perekonomian Provinsi Banten yang semakin kompetitif melalui basis sektor kreatif, unggulan, pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru, perkuatan pemerataan, dan peningkatan nilai tambah tinggi yang didorong dengan daya saing berbasis riset, inovasi, dan hilirisasi di berbagai sektor unggulan dan potensial;
2. Sumber daya manusia yang unggul didukung oleh aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan hal lainnya untuk menciptakan masyarakat di Provinsi Banten yang unggul, berdaya saing, dan berkeahlian tinggi sebagai modal dasar

bersaing secara global dengan berprinsip mengedepankan keadilan tanpa diskriminasi bagi seluruh lapisan masyarakat (no one left behind);

3. Penciptaan pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup ditopang dengan sarana dan prasarana yang memadai, berkualitas, dan berkelanjutan;
4. Pemerintahan yang jujur, transparan, dan akuntabel tanpa penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan golongan.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka disusunlah Misi. Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten 2025 – 2029 tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

MISI

1. Mewujudkan Masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan tangguh;
2. Mendorong kemajuan ekonomi secara inklusif melalui penguatan sektor kreatif, unggulan dan potensial;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas;
5. Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan secara holistik dan resiliensi terhadap bencana.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Adapun tantangan dan permasalahan pelayanan sektor kesehatan yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi RPJMD diantaranya:

1. Kurangnya akses layanan kesehatan yang berkualitas, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Upaya peningkatan akses dan kualitas layanan harus terus dilakukan melalui pengembangan Puskesmas rawat inap serta pembangunan pusat kesehatan desa untuk menjangkau masyarakat terisolasi. Optimalisasi tenaga medis, fasilitas, dan program kesehatan menjadi prioritas dalam mewujudkan Banten Sehat. Selain itu, modernisasi sistem pelayanan publik diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih cepat, mudah dan merata.
2. Permasalahan pembangunan dapat dilihat dari gap antara target dalam dokumen perencanaan dengan realisasi yang terjadi. Pembangunan akan dinilai mengalami permasalahan ketika realisasi capaian tidak sesuai dengan target yang tercantum dalam dokumen perencanaan.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten secara umum adalah terselenggaranya pembangunan Kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat Kesehatan Masyarakat Banten yang setinggi-tingginya. Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2025-2029 yang secara langsung berkaitan dengan urusan Kesehatan, yaitu

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun sasaran dari tujuan tersebut yang berkaitan dengan Dinas Kesehatan adalah Meningkatnya kualitas taraf kesehatan masyarakat.

Dalam upaya mencapai target Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten 2025-2029, Dinas Kesehatan merumuskan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan beserta Indikator Kinerja yang tertuang dalam dokumern Renstara Dinas Kesehatan Provinsi Banten disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

**Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Berdasarkan RENSTRA 2025-2029**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup	75,20	75,47	75,73	76,30	76,77	77,07
		Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	101	98	96	85	64	64
		Meningkatnya Penemuan Kasus Tuberkulosis	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage - %)	95	95	95	95	95	95
		Meningkatnya 4 (empat) Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi pada RS	Persentase 4 (empat) Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi	25	25	50	50	75	75

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Rujukan Regional Provinsi	yang Berklasifikasi Utama						
2	Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (Persen)	20,30	19,50	18,40	17,50	16,70	16,10
		Meningkatnya Cakupan 9 Layanan Intervensi Stunting	Persentase Cakupan 9 Layanan Intervensi dalam Penurunan Stunting	62	66	70	74	77	77

Sumber: Renstra 2025-2029

Arah Kebijakan merupakan rumusan yang merasionalkan pilihan strategi agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran dalam waktu 5 (lima) Tahun, memiliki fokus berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan struktur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten 2025-2029.

Tabel 2.2			
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan			
Visi : BANTEN MAJU, ADIL MERATA TIDAK KORUPSI			
Misi 3: Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Optimalisasi pembiayaan dan mutu layanan kesehatan
	Meningkatnya Cakupan 9 Layanan Intervensi Stunting	Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing melalui Pembangunan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akses dan manajemen terpadu terhadap pelayanan kesehatan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

Visi : BANTEN MAJU, ADIL MERATA TIDAK KORUPSI			
Misi 3: Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif			
	Meningkatnya Kasus Penemuan Tuberkulosis	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat	Pemenuhan standar akreditasi fasilitas kesehatan ditunjang dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan
	Meningkatnya 4 (empat) Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi pada Rumah Sakit Rujukan Regiona	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Pengembangan center of excellence sektor kesehatan dan keolahragaan.

Sumber: Perubahan Renstra 2025-2029

Sejalan dengan dinamika pembangunan daerah dan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029, Dinas Kesehatan Provinsi Banten melakukan penyesuaian perencanaan strategis melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra 2025-2029 ini merupakan bentuk penyelarasan terhadap visi terbaru Pemerintah Provinsi Banten yaitu "Banten yang Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi". Meskipun periode transisi RPD 2023-2026 masih berjalan, kehadiran Renstra 2025-2029 menjadi acuan mutakhir dalam menentukan arah kebijakan kesehatan yang lebih adaptif terhadap isu strategis nasional dan daerah terkini, seperti akselerasi transformasi kesehatan dan penguatan daya saing SDM melalui layanan kesehatan yang inklusif.

Adapun sebagai bagian pendukung dari program kepala daerah di Provinsi Banten, berikut merupakan program turunan dalam RENSTRA Dinas Kesehatan 2025-2029:

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

**TABEL 2.3
PROGRAM UNGGULAN DAN PROGRAM TURUNAN KEPALA DAERAH DALAM RENSTRA
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029**

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 (TAHUN)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Banten Sehat	Faskin Kita	Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Penanganan Stunting, TBC dan Malaria	8 Kab / Kota
Banten Sehat	Faskin Kita	Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat	Penanganan Limbah Medis Terintegrasi	Penanganan Limbah Medis	4 RS
Banten Sehat	Faskin Kita	Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat	Mobil Klinik Keliling	Penyediaan Mobil Klinik besera Operasional dalam Pelayanan Masyarakat	12 unit
Banten Sehat	Faskin Kita	Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat	Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	Cek / Pemeriksaan Kesehatan Gratis	1.919.197 orang
Banten Sehat	Faskin Kita	Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat	Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	Penyediaan Anggaran Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat (PBI, PBPU dan BP)	5 tahun
Banten Sehat	Faskin Kita	Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kualitas	Pembangunan Rumah Sakit Baru	2 unit

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJI-P)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 (TAHUN)
			Infrastruktur Kesehatan		
Banten Sehat	Faskin Kita	Peningkatan Pembangunan Kualitas Keluarga yang Inklusif	Penyediaan Alat Peraga Penunjang Edukasi dan Konseling KB	Promosi, Publikasi dan Edukasi	1 dokumen
Banten Melayani	Terobos	Peningkatan Pendapatan Daerah	Optimalisasi Retribusi dan Pemanfaatan Aset Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah	Pelaksanaan Operasional Layanan Kesehatan	5 unit
		Transformasi Organisasi / Kelembagaan Yang Berkapabilitas Tinggi, Lincah, Adaptif dan Kolaboratif	Inventarisasi dan Penataan Aset Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah	4 dokumen
		Transformasi Organisasi / Kelembagaan Yang Berkapabilitas Tinggi, Lincah, Adaptif dan Kolaboratif	Dukungan Pemanfaatan Aset Daerah	Penyediaan dan Pemanfaatan Aset	1 unit

Sumber data : RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

2.2 Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana Kerja Dinas (Renja) Kesehatan merupakan usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Renja disusun untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan, Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 masih menggunakan indikator yang tercantum didalam dokumen rencana strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2023-2026. Secara rinci disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)
	DINAS KESEHATAN (INDUK + LABKESDA + UPLEKES + RSUD BANTEN + RSUD MLP + RS LABUAN + RS CILOGRANG)	1.071.638.341.515,00
	DINAS KESEHATAN INDUK+LABKESDA+PELKES+LABUAN+CILOGRANG	674.318.356.048,00
	DINAS INDUK	536.427.049.788,00
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	55.454.408.019,00
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	577.846.200,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	245.119.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.910.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.430.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.990.000,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.977.200,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.600.000,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	209.081.000,00

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)
8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor Daerah	37.170.000,00
9	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.569.000,00
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.139.339.619,00
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.430.335.219,00
11	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	689.736.000,00
12	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.178.800,00
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.273.600,00
14	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	816.000,00
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000,00
15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000,00
16	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00
17	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000,00
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.250.000,00
18	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	105.250.000,00
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.994.395.000,00
19	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	109.409.000,00
20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	439.571.200,00
21	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	273.995.800,00
22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	685.186.000,00
23	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.163.000,00
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	312.930.000,00
25	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	23.140.000,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.271.072.000,00
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.533.072.000,00
27	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.738.000.000,00
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.416.590.200,00
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	945.089.042,00
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.471.501.158,00
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.899.915.000,00
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.176.000,00
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.163.196.000,00
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	403.515.000,00
33	Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	770.000.000,00
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	216.376.000,00
35	Pemeliharaan/Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	266.652.000,00
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	459.548.370.513,00
I	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	60.341.464.093,00
36	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	-
37	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	816.790.000,00
38	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	59.524.674.093,00
J	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	382.497.505.020,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)
39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	452.646.000,00
40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	202.900.000,00
41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.000.797.000,00
42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	30.892.000,00
43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	781.440.000,00
44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	574.681.000,00
45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.102.577.000,00
46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	721.888.600,00
47	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.198.172.000,00
48	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	37.255.600,00
49	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	718.743.000,00
50	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	124.558.000,00
51	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	370.899.917.620,00
52	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	154.551.000,00
53	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1.792.431.000,00
54	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1.115.732.200,00
55	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	228.097.000,00
56	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	360.226.000,00
II	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	16.709.401.400,00
57	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	270.782.000,00
58	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	16.438.619.400,00
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	19.354.392.256,00

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)
L	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	19.354.392.256,00
59	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	19.289.297.256,00
60	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	65.095.000,00
IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.096.897.000,00
M	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	978.689.800,00
61	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbita Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	978.689.800,00
N	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	118.207.200,00
62	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	118.207.200,00
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	972.982.000,00
O	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	620.902.000,00
63	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	620.902.000,00
P	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	352.080.000,00
64	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	352.080.000,00
UPTD LABKESDA		17.280.981.946,00
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.279.517.252,00
A	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	134.398.000,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	134.398.000,00
B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	484.369.000,00
2	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.351.000,00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	279.079.000,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.920.000,00
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.299.000,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.720.000,00
C	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.490.300.000,00
7	Pengadaan Mebel	627.184.000,00
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.337.947.000,00
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	212.056.000,00
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	313.113.000,00
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.797.499.252,00
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	581.299.372,00
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.216.199.880,00
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.372.951.000,00
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	288.760.000,00
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.457.000,00
15	Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	769.305.000,00
16	Pemeliharaan/Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	135.429.000,00
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MEASYARAKAT	9.001.464.694,00
F	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	9.001.464.694,00
17	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.406.774.120,00
18	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	2.295.526.000,00
19	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	2.389.965.000,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)
20	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	485.315.000,00
21	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.423.884.574,00
UPTD PELATIHAN KESEHATAN		1.705.117.284,00
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	991.037.284,00
A	Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.173.600,00
1	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.066.600,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.870.000,00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.889.000,00
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.830.000,00
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.360.000,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.158.000,00
B	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	188.684.684,00
7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	188.684.684,00
C	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	482.041.000,00
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.864.000,00
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	371.177.000,00
D	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	138.138.000,00
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.977.000,00
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.959.000,00
12	Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	202.000,00
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	714.080.000,00

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)
E	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	714.080.000,00
13	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	646.435.000,00
14	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	67.645.000,00
UPTD RSUD BANTEN		292.036.202.628,00
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	289.683.702.628,00
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70.067.186.300,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70.067.186.300,00
B	Peningkatan Pelayanan BLUD	219.616.516.328,00
2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	219.616.516.328,00
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MEASYARAKAT	2.352.500.000,00
C	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.352.500.000,00
3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	2.352.500.000,00
UPTD RSUD MALINGPING		105.283.782.839,00
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	102.933.782.839,00
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.597.402.067,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.388.942.067,00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	208.460.000,00
B	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.181.730.094,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.181.730.094,00
C	BLUD	54.154.650.678,00
4	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	54.154.650.678,00

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MEASARAKAT	2.350.000.000,00
D	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.350.000.000,00
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2.350.000.000,00
UPTD RSUD LABUAN		55.357.362.214,00
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	42.647.447.819,00
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.820.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	960.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.140.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.440.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.320.000,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	960.000,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.863.120.363,00
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.728.017.963,00
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	127.588.000,00
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.098.000,00
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.966.400,00
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	450.000,00
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.400.000,00
13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	87.400.000,00
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.869.850.600,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)
15	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	110.018.000,00
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	441.828.000,00
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	646.120.900,00
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	203.965.000,00
19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	381.199.800,00
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.999.900,00
21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	31.719.000,00
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	672.028.700,00
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	389.383.900,00
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	282.644.800,00
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.230.246.156,00
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.685.560.000,00
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.544.686.156,00
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.915.982.000,00
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220.060.000,00
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	723.396.000,00
28	Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	404.000.000,00
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	107.500.000,00
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	461.026.000,00
G	BLUD	7.000.000.000,00
31	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	7.000.000.000,00
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MEASYARAKAT	12.709.914.395,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)
H	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	12.709.914.395,00
32	Pengembangan Rumah Sakit	350.000.000,00
33	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	7.738.049.175,00
34	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	200.000.000,00
35	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	199.668.000,00
36	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.222.197.220,00
UPTD RSUD CILOGRANG		63.547.844.816,00
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	44.179.521.832,00
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.530.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.510.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	380.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	800.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	940.000,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.600.000,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.240.000,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.060.000,00
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.597.130.376,00
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.470.792.376,00
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	125.110.000,00
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	398.000,00
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	680.000,00
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	150.000,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.400.000,00
13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	87.400.000,00
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.799.908.700,00
15	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	130.022.000,00
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	514.156.000,00
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	496.873.000,00
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	203.748.500,00
19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	403.763.200,00
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.596.000,00
21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	31.750.000,00
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.093.426.429,00
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.013.426.429,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.080.000.000,00
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.749.060.327,00
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	896.538.000,00
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.852.522.327,00
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.842.066.000,00
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177.790.000,00
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.070.897.000,00
27	Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	986.660.000,00
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	606.719.000,00
G	BLUD	4.000.000.000,00
29	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.000.000.000,00

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MEASYARAKAT	19.368.322.984,00
H	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	17.597.322.984,00
30	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	10.167.366.799,00
31	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	200.000.000,00
32	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	330.000.000,00
33	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.899.956.185,00
J	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.771.000.000,00
34	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.771.000.000,00

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

Indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 telah menggunakan sasaran dan indikator yang tercantum dalam Dokumen RENSTRA 2025-2029. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp.)
1	Meningkatnya Penemuan Kasus Tuberkulosis	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage - %)	95	Persen	1.071.638.341.515,00
2	Meningkatnya Cakupan 9 Layanan Intervensi Stunting	Persentase Cakupan 9 Layanan Intervensi dalam Penurunan Stunting	62	Persen	
3	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI)	101	Rasio	
4	Meningkatnya 4 Layanan Unggulan Kesehatan dengan System Rujukan Berbasis Kompetensi pada	Persentase 4 (empat) Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi yang Berklasifikasi Utama	25	Persen	

Sumber: IKU dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan kinerja tahun pertama dari RPJMD Provinsi Banten 2025 – 2029 serta Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2025 – 2029 sekaligus kinerja akhir dari RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026, yang didukung dengan anggaran Pembangunan Kesehatan pada APBD sebesar Rp. **1.071.638.341.515,00** yang terbagi dalam 17 Program, 49 kegiatan, 177 Sub Kegiatan serta 4 kegiatan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) pada RSUD Uwes Qorny Cilograng, RSUD Muhammad Irsyad Djuwaeli Labuan, RSUD Malingping dan RSUD Banten.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

Pada Perubahan perjanjian kinerja tahun 2025 pada tingkat indikator program masih menggunakan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam RENSTRA 2023 – 2026. Pada Urusan Wajib Kesehatan didukung oleh 5 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.6

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kesehatan (RENSTRA 2023 – 2026)**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program						
				2023	Realisasi	2024	Realisasi	2025	Realisasi	2026
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih / Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan Dinas Kesehatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		70 - 80	78,5	70 - 80	78,8	70 - 80		70 - 80
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Persentase Ketercapaian dari seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Ketercapaian dari seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Labkesda	100	100	100	100	100	100	100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program						
				2023	Realisasi	2024	Realisasi	2025	Realisasi	2026
			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Pelatihan Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT RSUD Banten	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT RSUD Malingping	100	100	100	100	100	100	100
	Terwujudnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan Guna Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM / Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Rasio Kematian Ibu dan Rasio Kematian Bayi		81 dan 4,7	75,9 dan 5	80 dan 4,6	75,40 dan 4,5	79 dan 4,5	58,26 dan 4,5	78 dan 4,4
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau	100	100	100	100	100	100	100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program						
				2023	Realisasi	2024	Realisasi	2025	Realisasi	2026
			Berpotensi Bencana Provinsi							
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Bersiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	100	100	100	100	100	100	100
			Peningkatan jumlah parameter laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi	118 Parameter	118 Parameter	123 Parameter	126 Parameter	128 Parameter	154 Parameter	133 Parameter
			Ketersediaan Fasilitas Pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu	239	252	239	261	242	261	245
			Rasio Daya Tampung RS Rujukan	0,13 rasio	0,13 rasio	0,14 rasio	0,14 rasio	0,14 rasio	0,14 rasio	0,14 rasio
			Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi	79,20	91	79,37	94,78	80,16	97,05	80,95

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program						
				2023	Realisasi	2024	Realisasi	2025	Realisasi	2026
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							
			Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan	470 orang	470 orang	470 orang	470 orang	470 orang	470 orang	470 orang
			Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat	360 orang	360 orang	420 orang	449 orang	480 orang	480 orang	540 orang
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT	100	100	100	100	100	100	100
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							
			Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	13 kel masy	13 kel masy	14 kel masy	14 kel masy	15 kel masy	15 kel masy	16 kel masy
		Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam		40%	66,6%	50%	75%	60%	83,3%	70%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program						
				2023	Realisasi	2024	Realisasi	2025	Realisasi	2026
		Penurunan Stunting								
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
			Cakupan Kualitas Keluarga Sehat	57%	78,5%	57%	87%	64%	81,25%	64%
			Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban)	86%	90,6%	86%	94%	90%	95,73%	90%
	Terwujudnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan Guna Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM / Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan		76,92	76,93	92,31	92,31	100	100	100
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
			Persentase standar bagian pelayanan sebagai RS pendidikan	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase standar bagian pelayanan keperawatan sebagai RS pendidikan Persentase standar	100	100	100	100	100	100	100

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program						
				2023	Realisasi	2024	Realisasi	2025	Realisasi	2026
			Persentase standar bagian pelayanan medis sebagai RS pendidikan	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase standar bagian penunjang sebagai RS pendidikan	50	50	100	100	100	100	100
			Persentase Standar Bagian Penunjang Logistik Sebagai RS Pendidikan	50	50	100	100	100	100	100
			Persentase standar bagian penunjang Rekam Medis dan SIM RS sebagai RS pendidikan	50	50	100	100	100	100	100
		Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit		100	100	100	100	100	100	100
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
			Capaian variabel indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100	100	100	100	100	100	100
			Capaian variabel indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100	100	100	100	100	100	100
			Capaian variabel indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100	100	100	100	100	100	100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

Jika dibandingkan dengan tujuan dan sasaran kinerja pada Dokumen RENSTRA, hanya indikator sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang belum terdapat realisasi / capaian sasaran, hal tersebut dikarenakan nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2025 masih harus menunggu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 dan penilaian dari Inspektorat Provinsi Banten yang akan diumumkan pada bulan Maret atau April tahun 2026.

Capaian sasaran dan kinerja Program pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan target tahun 2025 dalam dokumen RENSTRA Tahun 2025 – 2029 tercapai seluruhnya, hal tersebut menunjukkan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sudah sangat baik.

Tabel 2.7

Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan Tahun 2025 (RENSTRA 2025 – 2029)

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program	
				2025	Realisasi
1	Meningkatnya Penemuan Kasus Tuberkulosis	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage - %)		95	111,9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program	
				2025	Realisasi
			Indeks Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan Induk, UPTD Labkesda Provinsi Banten, UPTD Pelatihan Kesehatan Provinsi Banten)	74	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase Ketercapaian angka keberhasilan pengobatan tuberculosis, presentase hipertensi dalam pengendalian, dan diabetes melitus dalam pengendalian	100	100
			Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	76	91,11
			Persentase Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan STBM	37,5	62,5
	Meningkatnya Cakupan 9 Layanan Intervensi Stunting	Persentase Cakupan 9 Layanan Intervensi dalam Penurunan Stunting		62	100
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase Tercapainya Cakupan Layanan Intervensi dalam Penurunan Stunting	64	100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program	
				2025	Realisasi
			<u>Cakupan imunisasi bayi lengkap</u>	75	104,8
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
			Persentase masyarakat yang mengimplementasi kan PHBS	65,22	90
	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)		101	58,26
			Persentase Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi	100	100
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	100	100
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Bersiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	100	100
			Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terkreditasi	91	97,05
			Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,91	1,36
			Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan sesuai standar	97	100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program	
				2025	Realisasi
			Persentase Penderita gangguan jiwa dan Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pengobatan dan tidak diterlantarkan	100	100
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	98,77	100
			Persentase kualitas pelayanan kesehatan primer sesuai standar	71,5	83
			persentase Ibu Bersalin melakukan persalinan di fasilitas kesehatan	80	104,3
			Persentase Ketercapaian Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	50	100
			Persentase Masyarakat yang memahami GERMAS	65	97
			Persentase pemanfaatan Fungsi Labkesmas Tingkat III	66,67	66,67
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
			Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis di Kabupaten/Kota Sesuai Standar	12,5	12,5
			Persentase SDM Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai standar	25	25

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program	
				2025	Realisasi
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
			Persentase sarana Kefarmasian Tingkat Provinsi yang memenuhi syarat	75	77,5
	Meningkatnya 4 (empat) Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berkas Kompetensi pada RS Rujukan Regional Provinsi	Persentase 4 (empat) Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berkas Kompetensi yang Berklasifikasi Utama		25	25
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
			Indeks Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah (UPTD RSUD Banten, UPTD RSUD Malingping, UPTD RSUD M Irsyad Djuwaeli Labuan, UPTD RSUD Uwes Qorny Cilograng)	74	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase sarana dan prasarana RSUD Banten sesuai standar yang terpenuhi	65	65
			Nilai Akreditasi RSUD Banten	80	80
			Persentase digitalisasi layanan kesehatan di RSUD Banten	75	75

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program	
				2025	Realisasi
			Peresentase Pengembangan Fasilitas Layanan Kesehatan UPTD RSUD Malingping	80	80
			Jumlah SPM Sub Variabel Kegawat daruratan UPTD RSUD Malingping	1	1
			Persentase digitalisasi layanan kesehatan di RSUD Malingping	50	50
			Nilai Akreditasi RSUD Labuan	60	60
			Persentase digitalisasi layanan Kesehatan RSUD Labuan	50	71,42
			Jumlah SPM Sub Variabel Kegawat daruratan UPTD RSUD Labuan	1	1
			Nilai Akreditasi RSUD Ciligrang	60	60
			Persentase digitalisasi layanan Kesehatan RSUD Ciligrang	50	85,71
			Jumlah SPM Sub Variabel Kegawat daruratan UPTD RSUD Ciligrang	1	1

Sumber: Data diolah

Pada capaian indikator kinerja program dengan indikator kinerja yang tercantum pada RENSTRA 2025 – 2029, Dinas Kesehatan berhasil mencapai realisasi kinerja yang sangat baik dimana seluruh target IKK tercapai.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Penyelenggaraan Pemerintahan menuju *Good Governance* dalam rangka reformasi birokrasi yang berbasis kinerja menuntut pelaksanaan program/kegiatan yang berorientasi pada hasil atau keluaran yang memberikan dampak perbaikan atau perubahan di Masyarakat. Laporan akuntabilitas kinerja menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan oleh Masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam pelaksanaan program/kegiatan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan transparan.

Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Laporan hasil PKO menjadi satu kesatuan dengan laporan hasil evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah entitas akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan capaian perjanjian kinerja dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan penjelasan sebagai berikut:

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Unit Organisasi setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja;

2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada entitas akuntabilitas kinerja dalam Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diterbitkan oleh Inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal instansi Pemerintah. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berupa nilai dan kategori/predikat sebagai berikut:

Tabel 3.1

**Nilai dan Kategori Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah**

Nilai	Kategori/Predikat
>90 – 100	AA / Sangat Memuaskan
>80 – 90	A / Memuaskan
>70 – 80	BB / Sangat Baik
>60 – 70	B / Baik
>50 – 60	CC / Cukup (Memadai)
>30 – 50	C / Kurang
>0 – 30	D / Sangat Kurang

Cara perhitungan PKO sesuai dengan lampiran Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

tertuang dalam matriks sebagai berikut:

**Tabel 3.2
Makriks PKO**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) $1 \times (100\% - 2)$
	Total Capaian PK (4)							
	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)							
	Predikat PKO (6)							

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan memperhatikan prinsip PKO sebagaimana disebut di atas yaitu terkait dengan prinsip berorientasi hasil serta mempertimbangkan koreksi terhadap anomaly capaian kinerja instansi dan unit/satuan kerja, maka dipandang perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- (i) Jika capaian kinerja setiap indikator **>110%** maka akan dinormalisasi menjadi **110%**, dan
- (ii) Jika capaian kinerja setiap indikator **≤110%** maka tidak dilakukan normalisasi.

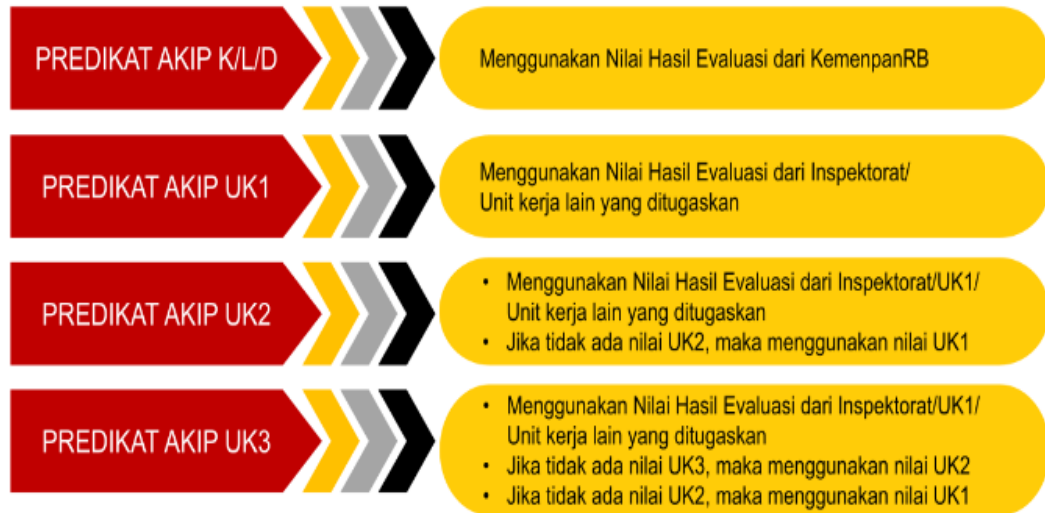
2. Koreksi normalisasi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Setelah normalisasi capaian perjanjian kinerja dilakukan terhadap masing-masing indikator maka hasil normalisasi tersebut dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana gambar berikut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

Gambar 3

Sumber Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Sumber: Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi factor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagai mana yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Koreksi Cpaaian Perjanjian Kinerja Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

PREDIKAT AKIP	KOREKSI CAPAIAN PK SETELAH NORMALISASI
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

3. Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja

Selanjutnya akan diperoleh nilai akhir capaian perjanjian kinerja yang merupakan hasil perkalian normalisasi capaian perjanjian kinerja (Langkah 1) dengan hasil pengurangan 100% dan koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Langkah 2)

4. Total Capaian Perjanjian Kinerja

Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian PK (langkah 3) pada setiap indikator kinerja

5. Nilai Kinerja Organisasi

Nilai kinerja organisasi merupakan hasil perhitungan dari total capaian perjanjian kinerja (Langkah 4) dibagi dengan jumlah indikator kinerja

6. Predikat PKO

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.4
Predikat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)**

NILAI KINERJA ORGANISASI	PREDIKAT PKO
$X > 100\%$	ISTIMEWA
$80\% < X \leq 100\%$	BAIK
$60\% < X \leq 80\%$	BUTUH PERBAIKAN
$20\% < X \leq 60\%$	KURANG
$0\% < X \leq 10\%$	SANGANT KURANG

Penentuan predikat PKO entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi juga dapat mempertimbangkan ekspektasi pimpinan 1 (satu) level di atas Entitas Akuntabilitas Kinerja yang dinilai.

Selanjutnya, setiap predikat PKO memiliki makna yang

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

menggambarkan tingkatan kualitas capaian kinerja organisasi. Terjemahan pada setiap predikat adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5
Interpretasi Predikat PKO**

Predikat Kinerja Organisasi	Interpretasi
ISTIMEWA	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit organisasi
BAIK	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi
BUTUH PERBAIKAN	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih di bawah ekspektasi/target
KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target
SANGAT KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan di bawah ekspektasi/target

Dalam mengukur capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2025, berikut disampaikan target kinerja tahun 2025 beserta realisasi kinerjanya dan perbandingan-perbandingan terhadap target dan realisasi kinerja yang dijelaskan dalam poin-poin berikut ini:

3.1.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan, berikut ditampilkan capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025:

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

**Tabel 3.6
Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun
2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025 (PK Perubahan)	Realisasi	Capaian	Normalisasi	Koreksi	Nilai Akhir
1	Meningkatnya Penemuan Kasus Tuberkulosis	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage-%)	95%	111,90 %	117,79%	110%	15%	93,50%
2	Meningkatnya Cakupan 9 Layanan Intervensi Stunting	Persentase Cakupan 9 Layanan Intervensi dalam Penurunan Stunting	62%	100%	161,29%	110%	15%	93,50%
3	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 keahlihan hidup)	101	56,92	143,64%	110%	15%	93,50%
4	Meningkatnya 4 layanan unggulan Kesehatan dengan system rujukan berbasis kompetensi pada RS Rujukan Regional Provinsi	Persentase 4 (empat) Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi yang Berklasifikasi Utama	25%	25%	100%	100%	15%	85,00%
Total Capaian PK							365,50	
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata-rata capaian PK							91,38	
Predikat Kinerja Organisasi (PKO)							BAIK	

Sumber: Berita Acara Hasil Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Pada tabel 3.6 dapat dijelaskan bahwa Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Dinas Kesehatan Provinsi Banten mendapatkan nilai 91,38 dan masuk dalam kategori BAIK. Artinya Tingkat implementasi kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.

Perhitungan PKO tersebut telah berdasarkan Peraturan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi yang kemudian perhitungan tersebut diimplementasikan pada Aplikasi bernama SIMAKIP. Dan dengan rumus perhitungan dalam aplikasi sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKt} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \text{ IKt}}{\text{Target IKt}} \times 100\%$$

Dalam rumusan tersebut dapat diketahui bahwa Indikator yang semakin tinggi, semakin buruk atau semakin rendah, semakin baik capaian kinerja, pengukuran menggunakan rumus. Maka, dari tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada Tahun 2025 tercapai sesuai dengan target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2025-2029. Berikut adalah Langkah-langkah perhitungan capaian IKU:

1. Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis

Pada tahun 2024 sasaran “Meningkatnya penemuan kasus tuberkulosis” belum menjadi sasaran utama Dinas Kesehatan Provinsi Banten, tetapi sesuai dengan prioritas Presiden yang tertuang dalam RENSTRA Kementerian Kesehatan, eliminasi TBC adalah salah satu prioritas yang harus dicapai oleh seluruh daerah di Indonesia.

Pada tahun 2025, sasaran tersebut dengan indikator kinerja “Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*)” realisasinya telah melebihi target dan jika dibandingkan dengan realisasi sampai dengan Desember tahun 2024 (target nasional 90% realisasi Dinkes 110,7%) terdapat peningkatan capaian sebesar 101,1%. Dengan data rincian per kabupaten/kota sebagai berikut:

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

Tabel 3.7

**Capaian Penemuan Dan Pengobatan Tuberkulosis
Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2025**

No	Kabupaten/Kota	Estimasi Kasus 2025	Jumlah Notifikasi Kasus TBC	Target Nasional	Target Banten	Capaian
1	Kab. Lebak	6.027	6.233	90%	95%	103%
2	Kab. Pandeglang	5.933	5.140	90%	95%	87%
3	Kab. Serang	7.612	6.100	90%	95%	80%
4	Kab. Tangerang	11.881	13.599	90%	95%	114%
5	Kota Cilegon	1.826	1.998	90%	95%	109%
6	Kota Serang	3.181	4.158	90%	95%	131%
7	Kota Tangerang	8.930	13.224	90%	95%	148%
8	Kota Tangerang Selatan	4.909	5.841	90%	95%	119%
	BANTEN	50.298	56.293	90%	95%	112%

Sumber: Umpan Balik Data Program TBC Tahun 2025 oleh bidang teknis

Adapun perbandingan antara Capaian Penemuan Dan Pengobatan Tuberkulosis Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten pada Tahun 2025 dengan 2024 ialah sebagai berikut:

Tabel 3.8

**Capaian Penemuan Dan Pengobatan Tuberkulosis
Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2024**

No	Kabupaten/Kota	Estimasi Kasus 2024	Jumlah Notifikasi Kasus TBC	Target	Capaian
----	----------------	---------------------	-----------------------------	--------	---------

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

1	Kab. Pandeglang	5.944	4.645	90%	78%
2	Kab. Lebak	6.038	5.867	90%	97%
3	Kab. Tangerang	11.902	14.638	90%	123%
4	Kab. Serang	7.626	5.959	90%	78%
5	Kota Tangerang	8.946	14.737	90%	165%
6	Kota Cilegon	1.829	2.035	90%	111%
7	Kota Serang	3.187	4.138	90%	130%
8	Kota Tangerang Selatan	4.918	6.571	90%	134%
	BANTEN	50.391	58.590	90%	116%

Sumber: Umpan Balik Data Program TBC Tahun 2024 oleh bidang teknis

Adapun perbandingan antara Capaian Penemuan Dan Pengobatan Tuberkulosis Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten pada Tahun 2025 dengan 2023 ialah sebagai berikut:

Tabel 3.9

**Capaian Penemuan Dan Pengobatan Tuberkulosis
Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2023**

No	Kabupaten/Kota	Estimasi Kasus 2023	Jumlah Notifikasi Kasus TBC	Capaian	Target
1	Kab. Pandeglang	3,829	3,609	94%	90%
2	Kab. Lebak	4,497	4,908	109%	90%
3	Kab. Tangerang	12,468	13,883	111%	90%
4	Kab. Serang	5,669	5,732	101%	90%
5	Kota Tangerang	10,181	13,532	133%	90%
6	Kota Cilegon	1,831	2,299	126%	90%
7	Kota Serang	2,790	3,701	133%	90%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

8	Kota Tangerang Selatan	5,926	5,863	99%	90%
	BANTEN	47,191	53,527	113%	90%

Sumber: Umpan Balik Data Program TBC Tahun 2023 oleh bidang teknis

Pada tabel diatas telah kita ketahui target, capaian dan realisasi dari penemuan kasus TBC. Adapun rumus hitung cakupan penemuan kasus TBC tersebut, dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{jumlah semua kasus TBC ditemukan yang dilaporkan}}{\text{perkiraan jumlah semua kasus TBC (insiden)}} \times 100\%$$

Keberhasilan Dinas Kesehatan Provinsi Banten atas capaian tersebut dipengaruhi oleh :

- Penguatan komitmen Kepala Daerah se Provinsi Banten dalam mendukung eliminasi TBC dari Gubernur, Bupati / Walikota sampai dengan tingkat kepala desa dan kelurahan
- Penemuan kasus aktif dan masif di fasilitas pelayanan kesehatan
- Skrining TBC yang telah terintegrasi dengan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

2. Angka Kematian Ibu

Perhitungan Angka Kematian Ibu menggunakan jumlah kelahiran hidup bayi, Jumlah Kematian Ibu pada saat hamil, bersalin dan nifas dengan rumus sebagai berikut:

Angka Kematian Ibu

$$= \frac{\text{Jumlah Kematian Ibu pada Saat Hamil, Melahirkan dan Nifas}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 100.000$$

Data kelahiran hidup dan kematian ibu diperoleh dari laporan Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10

Tabel Rasio Kematian Ibu

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Ibu
1	Kab. Pandeglang	20.431	22
2	Kab. Lebak	19.442	20
3	Kab Tangerang	57.408	23
4	Kab. Serang	26.571	17
5	Kota Tangerang	35.838	4
6	Kotas Cilegon	6.917	8
7	Kota Serang	10.159	12
8	Kota Tangsel	18.243	5
	Prov Banten	195.009	111

Sumber data: Laporan KIA Kab/Kota (diolah)

Berdasarkan data statistik kesehatan terbaru, Provinsi Banten mencatatkan total 195.009 kelahiran hidup dengan jumlah kematian ibu sebanyak 111 kasus. Data ini menunjukkan variasi yang cukup signifikan antara wilayah kabupaten dan kota dalam hal beban persalinan dan risiko keselamatan ibu.

a. Wilayah dengan Kelahiran Tertinggi

Kabupaten Tangerang menjadi wilayah dengan tingkat kelahiran paling tinggi, mencapai 62.220 jiwa, atau hampir 30% dari total kelahiran di seluruh provinsi. Meskipun memiliki beban persalinan terbesar, jumlah kematian ibu di wilayah ini (23 kasus) masih sedikit di bawah Kabupaten Pandeglang dan Lebak, menunjukkan manajemen risiko yang relatif ketat.

b. Analisis Titik Rawan Kematian Ibu

Terdapat tren menarik sekaligus memprihatinkan di wilayah selatan:

- Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak mencatatkan angka kematian ibu tertinggi di Banten, masing-masing dengan 24 kasus.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

- Hal ini menjadi catatan penting mengingat jumlah kelahiran di kedua wilayah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan Kabupaten Tangerang, namun memiliki fatalitas yang lebih tinggi.

c. Performa Wilayah Perkotaan

Wilayah kota cenderung menunjukkan angka kematian yang lebih rendah dibandingkan wilayah kabupaten:

- Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan mencatatkan angka kematian terendah, yakni masing-masing 5 kasus, meskipun jumlah kelahiran di Kota Tangerang cukup besar (38.647 jiwa).
- Sebaliknya, Kota Serang perlu mendapat perhatian lebih karena dengan jumlah kelahiran yang relatif sedang (11.890), angka kematian ibunya menyentuh 16 kasus, dua kali lipat lebih tinggi dari Kota Cilegon.

3. Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting

Capaian indikator Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting diperoleh dari capaian atas indikator intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang merupakan kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Indikator yang menjadi kewenangan dari Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

Tabel 3.11

**Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif
dalam Penurunan Stunting**

No	Indikator Layanan Intervensi Spesifik	Target Daerah	Capaian	Tercapai/ Belum Tercapai	Keterangan
1	Persentase ibu hamil mengonsumsi suplementasi gizi	48%	84,91	Tercapai	Data Laporan s/d 16 Desember 2025, data laporan 2025 belum final dan dipublikasikan kemenkes pada awal tahun 2026
2	Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	65%	91,08	Tercapai	Data Laporan s/d 16 Desember 2025, data laporan 2025 belum final dan dipublikasikan kemenkes pada awal tahun 2026
3	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	73%	93,66	Tercapai	Data Laporan s/d 16 Desember 2025, data laporan 2025 belum final dan dipublikasikan kemenkes pada awal tahun 2026

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

No	Indikator Layanan Intervensi Spesifik	Target Daerah	Capaian	Tercapai/ Belum Tercapai	Keterangan
4	Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	73%	90,00	Tercapai	Data Laporan s/d 16 Desember 2025, data laporan 2025 belum final dan dipublikasin kemenkes pada awal tahun 2026
5	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	64%	70,58	Tercapai	Data Laporan s/d 16 Desember 2025, data laporan 2025 belum final dan dipublikasin kemenkes pada awal tahun 2026
6	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	70%	99,46	Tercapai	Data Laporan s/d 16 Desember 2025, data laporan 2025 belum final dan dipublikasin kemenkes pada awal tahun 2026
7	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang	50	89,54	Tercapai	Data Laporan s/d 16 Desember 2025, data

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

No	Indikator Layanan Intervensi Spesifik	Target Daerah	Capaian	Tercapai/ Belum Tercapai	Keterangan
	dipantau pertumbuhan dan perkembangannya				laporan 2025 belum final dan dipublikasikan kemenkes pada awal tahun 2026
8	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	60%	66,50	Tercapai	Data Laporan s/d 16 Desember 2025, data laporan 2025 belum final dan dipublikasikan kemenkes pada awal tahun 2026
9	Persentase anak berusia dibawah 2 tahun (Baduta) yang memperoleh Imunisasi Lengkap	80	97,62	Tercapai	Data Laporan s/d 11 Desember 2025, data laporan 2025 belum final dan dipublikasikan kemenkes pada awal tahun 2026

Dari sembilan (9) indikator intervensi spesifik dan intervensi sensitive yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan, telah dicapai kesembilan (9) indikator tersebut pada tahun 2025. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

$$= \frac{\text{Komponen Intervensi Spesifik dalam Penurunan Stunting yang Mencapai Target}}{\text{Total Komponen Intervensi Spesifik yang Dilakukan}} \times 100.000$$

Pada tahun 2025 telah capaian Meningkatnya cakupan layanan 9 intervensi stunting melebihi target. Keberhasilan tersebut dapat tercapai karena :

1. Seluruh intervensi telah dilakukan secara komprehensif di Provinsi Banten;
2. Telah dilaksanakan pengadaan TTD bagi ibu hamil dan remaja untuk memenuhi kebutuhan sasaran;
3. Kerjasama dengan Nutrition International untuk intervensi zat gizi mikro termasuk tablet tambah darah;
4. Tata laksana pada balita gizi buruk telah dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti di Puskesmas dan Rumah Sakit;
5. Pembentukan Konselor menyusui guna mendukung tercapainya target ASI eksklusif telah terlaksana;
6. Tenaga kesehatan terlatih dan terorientasi Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan;
7. Pendataan dan pemantauan MP - ASI yang rutin dilaksanakan bekerjasama dengan kader di setiap posyandu;
8. Serta pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang dan ibu hamil KEK telah dilaksanakan di 8 (delapan) Kabupaten / Kota di Provinsi Banten.

Dari 9 indikator total indikator yang tercapai adalah 9 indikator sehingga $\frac{9}{9} \times 100 = 100\%$. Target kinerja Sasaran Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting Tahun 2025 adalah sebesar 100%, dengan realisasi kinerja sebesar 100% maka capaian kinerja sasarnya adalah 100% dan dari 9 indikator.

4. Meningkatkan Layanan Unggulan Kesehatan dan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi

Pada sasaran Meningkatnya 4 (empat) Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi pada RS Rujukan Regional Provinsi, pada tahun 2025 RSUD Banten telah memiliki layanan unggulan stroke yang telah sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan RI. Sasaran layanan unggulan di Rumah Sakit Rujukan Regional ini telah selaras dengan salah satu program prioritas Nasional untuk wilayah Provinsi Banten¹. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, UPTD RSUD Banten belum memiliki target layanan unggulan tersebut tetapi telah melakukan beberapa persiapan untuk pelaksanaan layanan unggulan di tahun 2025.

Pada tahun 2025 persentase 4 (empat) layanan unggulan kesehatan dengan sistem rujukan berbasis kompetensi yang berklasifikasi utama dengan target 25 % sudah tercapai 25 % (Satu Layanan Stroke dibagi 4 Layanan KJSU KIA) atau 100 %, sesuai dengan terbitnya keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1277/2024 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Urologi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Adapun rumus hitung pada capaian Persentase 4 (empat) Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi ialah sebagai berikut:

$$= \frac{1 \text{ Layanan Unggulan Utama}}{4 \text{ Layanan Unggulan Utama}} \times 100\%$$

Keberhasilan capaian Persentase 4 (empat) Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi

¹ *Highlight* Indikasi Intervensi pada halaman 52

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

yang Berklasifikasi Utama didukung oleh :

- Layanan Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)
Pada layanan kesehatan ibu dan anak ditunjang dengan terdapatnya fasilitas NICU/PICU, tersedianya layanan kebidanan & neonatal intensif, dan Penguatan layanan onkologi ginekologi (kanker pada ibu)
- Layanan Kanker
Pada layanan kanker ditunjang tersedianya layanan komprehensif (Radioterapi , Kemoterapi, dan Bedah Onkologi)
- Layanan Stroke
Pada layanan Stroke ditunjang tersedianya Stroke Center 24 Jam dan Menjadi bagian jejaring layanan stroke provinsi
- Layanan Jantung
Pada layanan Jantung ditunjang tersedianya Cathlab & ICCU, Dokter spesialis jantung (SpJP), Layanan kardiologi sebagai layanan unggulan, dan Bagian dari layanan prioritas KJSU provinsi

Pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 terdapat Indikator Kinerja Daerah yaitu Angka Kematian Balita dengan target pada tahun 2025 sebesar 12,56. Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada 2025 telah melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung kematian balita agar target RPJMD tersebut dapat tercapai, adapun angka kematian balita dijabarkan sebagaimana berikut:

Tabel 3.12
Jumlah Kematian Bayi (0 – 11 Bulan)
per Kabupaten / Kota Tahun 2025

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah
1	Kabupaten Pandeglang	137
2	Kabupaten Lebak	137
3	Kabupaten Tangerang	214

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

4	Kabupaten Serang	172
5	Kota Tangerang	36
6	Kota Cilegon	79
7	Kota Serang	92
8	Kota Tangerang Selatan	13
	Provinsi Banten	880

Sumber data : Seksi Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Dinkes Provinsi Banten

Tabel 3.13
Jumlah Kematian Balita (12 – 59 Bulan)
per Kabupaten / Kota Tahun 2025

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah
1	Kabupaten Pandeglang	1
2	Kabupaten Lebak	23
3	Kabupaten Tangerang	21
4	Kabupaten Serang	9
5	Kota Tangerang	6
6	Kota Cilegon	21
7	Kota Serang	1
8	Kota Tangerang Selatan	5
	Provinsi Banten	87

Sumber data : Seksi Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Dinkes Provinsi Banten

Pada tahun 2025, Provinsi Banten mencatatkan angka kematian balita sebesar 4,51 (Per 100.000 Kelahiran Hidup). Angka ini berada dibawah target RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025, capaian tersebut diperoleh karena Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk imunisasi dan perawatan prenatal, Program pemberian makanan tambahan dan pemantauan gizi untuk balita yang mencegah malnutrisi, Pemberian Edukasi dan peningkatan kesadaran Masyarakat melalui Penyuluhan mengenai kesehatan anak dan praktik makanan bergizi, sanitasi, serta perawatan anak yang baik.

Dapat dijabarkan kasus kematian bayi dan balita di Provinsi Banten Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

- Kematian Bayi: Kasus tertinggi terjadi di Kabupaten Tangerang (214 kasus), sementara yang terendah berada di Kota Tangerang Selatan (13 kasus).
- Kematian Balita: Angka tertinggi ditemukan di Kabupaten Lebak (23 kasus), sedangkan Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang mencatatkan angka terendah dengan masing-masing hanya 1 kasus.

Secara keseluruhan, risiko kematian anak di Banten jauh lebih tinggi pada fase bayi dibandingkan fase balita, dengan wilayah kabupaten masih mendominasi jumlah kasus dibandingkan wilayah kota.

Capaian sasaran Dinas Kesehatan tersebut juga turut dipengaruhi target kinerja Program yang tercapai sangat tinggi seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Program Dinas Kesehatan
Tahun 2025 (RENSTRA 2023 – 2026)

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Labkesda	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN	KRITERIA
		UPTD Pelatihan Kesehatan				
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kualitas Keluarga Sehat	64 %	81,25%	126,95%	Sangat Tinggi
		Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi Sehat (Jamban)	90%	95,73%	106,37%	Sangat Tinggi
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 %	100 %	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu	242	261	107,87%	Sangat Tinggi
		Rasio Daya Tampung RS Rujukan	0,14	0,14	100%	Sangat Tinggi
		Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	80,16%	97,05%	121,07%	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	100 %	100%	100%	Sangat Tinggi
		Peningkatan jumlah parameter laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi	128 parameter	154 parameter	120,31%	Sangat Tinggi

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN	KRITERIA
		(Labkesda Provinsi Banten)				
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan	470 Orang	470 Orang	100%	Sangat Tinggi
		Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat Pada UPTD Pelatihan Kesehatan	480 Orang	480 Orang	100%	Sangat Tinggi
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	15 Kelompok Masyarakat	15 Kelompok Masyarakat	100%	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat Capaian Indikator Kinerja Program pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025 sebanyak 19 indikator tercapai dengan sangat baik.

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Program UPTD RSUD Banten
Tahun 2025 (RENSTRA 2023 – 2026)

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD RSUD Banten	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2.	Program Pemenuhan Upaya	Persentase Standar Bagian Penunjang sebagai RS	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN	KRITERIA
	Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pendidikan (RSU Banten)				
		Persentase Standar Bagian Penunjang Logistik sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Standar Bagian Penunjang Rekam Medis dan SIM RS sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Standar Bagian Pelayanan sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Standar Bagian Pelayanan Medis sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Standar Bagian Keperawatan sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Program UPTD RSUD Malingping
Tahun 2025 (RENSTRA 2023 – 2026)

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD RSUD Malingping	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Capaian Variabel Indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN	KRITERIA
		Capaian Variabel Indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Program
UPTD RSUD M. Irsyad Djuwaeli Labuan
Tahun 2025 (RENSTRA 2023 – 2026)

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD RSUD M. Irsyad Djuwaeli Labuan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD M. Irsyad Djuwaeli Labuan)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Capaian Variabel Indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD M. Irsyad Djuwaeli Labuan)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Capaian Variabel Indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD M. Irsyad Djuwaeli Labuan)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Program
UPTD RSUD Uwes Qorny Cilograng
Tahun 2025 (RENSTRA 2023 – 2026)

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD RSUD Uwes Qorny Cilograng	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal UPTD RSUD Uwes Qorny Cilograng	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Capaian Variabel Indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal UPTD RSUD Uwes Qorny Cilograng	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Capaian Variabel Indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal UPTD RSUD Uwes Qorny Cilograng	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa seluruh capaian target kinerja Standar Pelayanan Mutu (SPM) pada UPTD RSUD Banten, RSUD Malingping, RSUD M. Irsyad Djuwaeli Labuan dan RSUD Uwes Qorny Cilograng tercapai.

3.1.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pembandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan. Hal ini

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

dikarenakan pada tahun 2025 Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah menggunakan RENTRA terbaru yakni RENSTRA 2025 – 2029 sebagaimana berikut:

**Table 3.19
Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025
1.	Meningkatnya Penemuan Kasus Tuberkulosis	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage-%)	95	111,9	117,8
2.	Meningkatnya Cakupan 9 Layanan Intervensi Stunting	Persentase Cakupan 9 Layanan Intervensi dalam Penurunan Stunting	62	100	161,3
3.	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 keahiran hidup)	101	58,26	173,4
4.	Meningkatnya 4 layanan unggulan Kesehatan dengan system rujukan berbasis kompetensi pada RS Rujukan Regional Provinsi	Persentase 4 (empat) Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi yang Berklasifikasi Utama	25	25	100

Sumber: data diolah

Dari table tersebut diketahui bahwa pada Tahun 2025, sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten sesuai yang tercantum pada perjanjian kinerja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah menggunakan sasaran OPD yang baru sesuai yang tercantum pada RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029. Hal tersebut menjadikan realisasi indikator kinerja utama tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, kecuali pada indikator Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup), memiliki indikator yang serupa pada IKU sebelumnya yaitu Rasio Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) sehingga dapat dibandingkan capaiannya.

Adapun Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja pada tahun

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

2024 ditunjukkan pada tabel berikut:

Table 3.20

Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintah dan Dinas Kesehatan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi) Perangkat Daerah	70–80	78,50	112,14
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Intervensi Spesifik dan Sensitif dalam Penurunan Stunting	50	75	150
		Rasio Kematian Ibu	80	71,7	110,34
		Rasio Kematian Bayi	4,6	4,5	102,17
3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Rumah Sakit Pendidikan	92,31	92,31	100
		Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	100	100	100

Kemudian bila dibandingkan dengan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja pada tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut:

Table 3.21

Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan Dinas Kesehatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79–80	82,5	103,12
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Percepatan Penurunan Stunting	Persen	49	60,67	116,80
		Rasio Kematian Ibu	Rasio	81	69,1	114,69

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

		Rasio Kematian Bayi	Rasio	0,4	5,0	93,62
		Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	Persen	76,92	76,93	100
3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	Persen	100	100	100

Pada IKU “Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup), terdapat penurunan AKI dari tahun 2024 Provinsi Banten yang semula 75,40 menjadi 58,26. Indikator kinerja AKI merupakan bersifat negatif, artinya jika capaiannya menurun dan atau dibawah target yang ditetapkan artinya semakin baik.

Penurunan AKI pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 dapat dicapai karena Pelayanan ANC sudah sesuai dengan standar, persalinan sudah dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, Fasilitas Kesehatan di 7 Kabupaten/ Kota sudah melaksanakan Quality Improvement (QI) Collaborative (106 Faskes), Dinas Kesehatan Provinsi mengeluarkan Surat Edaran tentang Upaya Percepatan Penurunan Angka Kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengeluarkan Surat Edaran tentang Pencatatan dan Pelaporan Program Gizi dan Kesehatan Keluarga di Provinsi Banten.

Indikator kinerja yang tidak tercantum pada RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi Banten baik pada Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kunci yaitu Angka Kematian Balita. Tetapi pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029, Angka Kematian Balita memiliki target sebesar 14,8 (per 1.000 kelahiran hidup), sehingga Dinas Kesehatan Provinsi Banten tetap memantau realisasi Angka Kematian Balita tahun 2025 dengan realisasi sebesar 4,5 capaian tersebut diperoleh karena Peningkatan akses

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk imunisasi dan perawatan prenatal, Program pemberian makanan tambahan dan pemantauan gizi untuk balita yang mencegah malnutrisi, Pemberian Edukasi dan peningkatan kesadaran Masyarakat melalui Penyuluhan mengenai kesehatan anak dan praktik makanan bergizi, sanitasi, serta perawatan anak yang baik.

Sasaran intervensi dalam penurunan Stunting mengalami perubahan yaitu yang pada tahun 2024 adalah “*Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting*” menjadi “*Meningkatnya cakupan layanan 9 intervensi stunting*”. Perbedaannya adalah pada tahun 2025 Dinas Kesehatan Provinsi Banten hanya mengukur capaian intervensi spesifik yaitu intervensi yang menangani akar masalah yang berdampak langsung, sementara pada sasaran kinerja sebelumnya juga terdapat intervensi spesifik dan sensitif, intervensi sensitif yaitu intervensi yang menanggulangi faktor penyebab stunting yang tidak langsung.

Pada tahun 2025 telah capaian Meningkatnya cakupan layanan 9 intervensi stunting melebihi target. Keberhasilan tersebut dapat tercapai karena :

- Seluruh intervensi telah dilakukan secara komprehensif di Provinsi Banten
- Telah dilaksanakan pengadaan TTD bagi ibu hamil dan remaja untuk memenuhi kebutuhan sasaran
- Kerjasama dengan *Nutrition International* untuk intervensi zat gizi mikro termasuk tablet tambah darah
- Tata laksana pada balita gizi buruk telah dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti di Puskesmas dan Rumah Sakit
- Pembentukan konselor menyusui guna mendukung tercapainya target ASI eksklusif telah terlaksana

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

- Tenaga kesehatan terlatih dan terorientasi Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
- Pendataan dan pemantauan MP - ASI juga sudah rutin dilaksanakan bekerjasama dengan kader di setiap posyandu
- Program pemberian imunisasi dasar lengkap pada balita juga sudah secara rutin dilaksanakan
- Serta pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang dan ibu hamil KEK telah dilaksanakan di 8 (delapan) Kabupaten / Kota di Provinsi Banten.

Pada tahun 2024 sasaran “Meningkatnya penemuan kasus tuberkulosis” belum menjadi sasaran utama Dinas Kesehatan Provinsi Banten, tetapi sesuai dengan prioritas Presiden yang tertuang dalam RENSTRA Kementerian Kesehatan, eliminasi TBC adalah salah satu prioritas yang harus dicapai oleh seluruh daerah di Indonesia. Pada tahun 2025, sasaran tersebut dengan indikator kinerja “Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*)” realisasinya telah melebihi target dan jika dibandingkan dengan realisasi sampai dengan Desember tahun 2024 (target nasional 90% realisasi Dinkes 110,7%) terdapat peningkatan capaian sebesar 101,1% Keberhasilan capaian tersebut dipengaruhi oleh :

- Penguatan komitmen Kepala Daerah se Provinsi Banten dalam mendukung eliminasi TBC dari Gubernur, Bupati / Walikota sampai dengan tingkat kepala desa dan kelurahan
- Penemuan kasus aktif dan masif di fasilitas pelayanan kesehatan
- Skrining TBC yang telah terintegrasi dengan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Pada sasaran Meningkatnya 4 (empat) Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi pada RS

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

Rujukan Regional Provinsi, pada tahun 2025 RSUD Banten telah memiliki layanan unggulan stroke yang telah sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan RI. Sasaran layanan unggulan di Rumah Sakit Rujukan Regional ini telah selaras dengan salah satu program prioritas Nasional untuk wilayah Provinsi Banten². Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, UPTD RSUD Banten belum memiliki target layanan unggulan tersebut tetapi telah melakukan beberapa persiapan untuk pelaksanaan layanan unggulan di tahun 2025.

Keberhasilan capaian Persentase 4 (empat) Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi yang Berklasifikasi Utama didukung oleh :

- Penyediaan ruangan khusus untuk pelayanan stroke
- Penyediaan sarana prasarana yang telah sesuai dengan layanan unggulan jantung dan stroke, yaitu bunker stroke
- Ketersediaan dokter spesialis, sub spesialis dan tenaga kesehatan terlatih lainnya yang dapat memberikan pelayanan unggulan stroke secara paripurna.

Capaian sasaran Dinas Kesehatan tersebut juga turut dipengaruhi target kinerja Program. Adapun target kinerja program masih menggunakan RENSTRA 2023 – 2026, yang tercapai sangat tinggi seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

² *Highlight* Indikasi Intervensi pada halaman 52

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Program
Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2024 dan 2025 (RENSTRA 2023 – 2026)

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Labkesda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Pelatihan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD RSUD Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD RSUD Malingping	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	Capaian Kualitas Keluarga Sehat	57%	78,5%	57%	87,00%	153%	64%	81,25%	126,95%
		Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi Sanitasi (Jamban)	86%	90,6%	86%	94%	109,30%	90%	95,73%	106,37%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN
	dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu	239	252	239	261	109%	242	261	107,85%
		Rasio Daya Tampung RS Rujukan	0,13	0,13	0,14	0,14	100%	0,14	0,14	100%
		Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	79,20%	91%	79,37%	94,78%	119,42%	80,16%	97,05%	121,1%
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan jumlah parameter lab kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi (Labkesda Provinsi Banten)	118 Parameter	118 Parameter	123 parameter	126 parameter	102,44%	100%	100%	100%
		Persentase Standar Bagian Penunjang sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN
		Persentase Standar Bagian Penunjang Logistik sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Standar Bagian Penunjang Rekam Medis dan SIM RS sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Standar Bagian Pelayanan sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Standar Bagian Pelayanan Medis sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Standar Bagian Keperawatan sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Capaian Variabel Indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Capaian Variabel Indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD M Irsyad Djuwaeli Labuan)						100%	100%	100%
		Capaian Variabel Indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD M Irsyad Djuwaeli Labuan)						100%	100%	100%
		Capaian Variabel Indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD M Irsyad Djuwaeli Labuan)						100%	100%	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN
		Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Uwes Qorny Cilograng)						100%	100%	100%
		Capaian Variabel Indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Uwes Qorny Cilograng)						100%	100%	100%
		Capaian Variabel Indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Uwes Qorny Cilograng)						100%	100%	100%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan	470 orang	470 orang	470 Orang	470 Orang	100%	470 Orang	470 Orang	100%
		Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat Pada UPTD Pelatihan Kesehatan	360 orang	360 orang	420 Orang	449 Orang	106,9%	480 Orang	480 Orang	100%
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	13 Kelompok Masyara	13 Kelompok Masyara	14 Kelompok Masyara	14 Kelompok Masyara	100%	15 Kelompok Masyara	15 Kelompok Masyara	100%

Jika dilihat pada tabel diatas, realisasi capaian program pada tahun 2023, 2024 dan 2025 telah tercapai dengan sangat baik untuk seluruh program di Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat seluruh target terealisasi dengan sangat baik, hal tersebut karena :

- Pada Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi kejadian luar biasa provinsi tercapai karena Koordinasi program yang ade kuat dengan Kabupaten / Kota dengan dukungan tim yang sudah terlatih di bidang programnya di antaranya program KLB dan Krisis Kesehatan, bekerja sama dengan Dinkes Kabupaten / Kota untuk Melakukan edukasi dan monitoring dan di lakukan secara terus menerus dengan sasaran masyarakat umum, dan mengevaluasi Pencapaian Program
- Pada Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi Sanitasi (Jamban) dapat tercapai dengan sangat baik karena kolaborasi dengan berbagai pihak (TSL Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, POKJA PKP, CSR, dan masyarakat), Dukungan anggaran (APBD Kabupaten / Kota, DAK Stunting Provinsi, PU, BPPW, DJPK, CSR & ll) dan adanya kebijakan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, adanya target terkait sanitasi
- Pada persentase jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dapat tercapai karena telah adanya koordinasi yang baik antara Dinas kesehatan dan Dinas Sosial se-Provinsi Banten dalam pembiayaan masyarakat

miskin baik dari anggaran APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota sehingga pembaharuan data masyarakat miskin yang belum memiliki JKN dapat segera ditindaklanjuti, selain itu Kabupaten Tangerang telah menjadi Kabupaten yang sepenuhnya mandiri dalam melaksanakan *Universal Health Coverage* sehingga tidak perlu dibantu Pemerintah Provinsi Banten lagi. Hal tersebut berimplikasi pada fokus dukungan kepada Kabupaten lain yang masih membutuhkan seperti Kabupaten Pandeglang. Dinas Kesehatan Provinsi Banten juga terus mendorong kemandirian Kabupaten / Kota lain agar dapat membiayai JKN di wilayahnya secara mandiri.

- Rasio ketersediaan tempat tidur dapat tercapai targetnya sebagai hasil upaya Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang secara aktif dan berkesinambungan mendorong setiap rumah sakit se Provinsi Banten untuk menyediakan jumlah tempat tidur sesuai standar kelas rumah sakit, baik melalui pertemuan sosialisasi dengan mengundang setiap rumah sakit se Provinsi Banten maupun monitoring evaluasi secara langsung ke rumah sakit pada saat rekomendasi perijinan rumah sakit. Selain itu optimalisasi pemanfaatan teknologi Sistem Informasi Rawat Inap (SIRANAP) Rumah Sakit turut berperan dalam penyediaan informasi tempat tidur di Rumah Sakit kepada pasien sehingga kasus masyarakat yang tidak mendapatkan ruang rawat inap di Rumah Sakit semakin menurun.
- Persentase pemenuhan obat publik dan perbekalan kesehatan tercapai karena Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengoptimalkan proses negosiasi dengan penyedia dan monitoring evaluasi kepada penyedia terkait ketersediaan

obat serta melakukan peningkatan akurasi penyusunan rencana kebutuhan obat dengan mempertimbangkan morbiditas dan memanfaatkan anggaran yang tersedia, serta penguatan koordinasi kebutuhan obat antara bagian Farmasi dan bagian program

- Persentase rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi dan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu dapat tercapai berkat Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang telah secara optimal melaksanakan pemetaan sekaligus pengawasan terhadap rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang belum terakreditasi dan akan habis masa berlaku akreditasinya. Dinas Kesehatan Provinsi Banten bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan Asosisasi perumahan sakitan melaksanakan pembinaan terhadap rumah sakit baik melalui pertemuan dengan mengundang rumah sakit dan Fasilitas pelayanan kesehatan primer maupun melalui kredensialing dengan BPJS Kesehatan. Selain itu peraturan yang mensyaratkan Fasilitas pelayanan kesehatan baik primer maupun rujukan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan telah mendorong setiap fasyankes secara aktif melaksanakan akreditasi dan mempertahankan mutu pelayanannya
- Pada cakupan kualitas keluarga sehat dari target 64% tercapai 81,25% disebabkan oleh kerjasama Dinas Kesehatan Provinsi Banten dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program kegiatan yang mencakup seluruh siklus kehidupan dan kerjasama dengan lintas sektor seperti DP3AKKB Provinsi Banten dan BKKBN serta organisasi profesi yang semakin baik
- Pada target capaian Persentase Pelayanan Kasus Penyakit

Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar telah tercapai dengan baik disebabkan karena tenaga kesehatan yang sudah dilatih dalam penatalaksanaan penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa semakin meningkat, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengobatan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular, kerjasama lintas sektor khususnya dalam pembiayaan kesehatan (BPJS Kesehatan) yang semakin solid sehingga masyarakat yang mengidap penyakit menular dan tidak menular dapat melaksanakan pengobatan di Fasyankes.

- Tercapainya kinerja UPTD Labkesda pada tahun 2025 dengan target 128 parameter dan terealisasi sebanyak 154 parameter dengan prosentase sebesar 120 %. Hal tersebut dapat dicapai karena Labkesda Provinsi Banten telah meningkatkan fasilitas, sarana prasarana dan peralatan yang dapat mendukung penambahan parameter pemeriksaan baik pada Laboratorium Pengujian maupun pada laboratorium kalibrasi dengan didukung juga oleh pelatihan SDM kesehatan sehingga kompetensi SDM semakin meningkat. Pada tahun 2025, UPTD Labkesda Provinsi Banten telah melakukan penambahan parameter pemeriksaan sebanyak 19 Jenis parameter pada Laboratorium Pengujian, dan 9 kemampuan kalibrasi alat kesehatan/alat lab pada lab kalibrasi, dan peran UPTD Labkesda Provinsi Banten sebagai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat III yang mempunyai peran menjadi rujukan bagi Labkesmas lain yang berada di wilayah Provinsi Banten baik labkesmas Tingkat 2 dan Tingkat 1 (Labkesmas di Puskesmas). Penambahan parameter tersebut

juga sejalan dengan bertambahnya kemampuan pemeriksaan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Banten mengacu pada standar kemampuan LabkesmasTingkat III yang diharapkan semakin memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan pemeriksaan Laboratorium kesehatan di UPTD Labkesda Provinsi Banten

- Pada tahun 2025 UPTD RSUD Muhammad Irsyad Djuwaeli Labuan dan UPTD RSUD Uwes Qorny Cilograng telah resmi beroperasi, indikator kinerja program ke dua Rumah Sakit tersebut adalah Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal, Capaian Variabel Indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal dan Capaian Variabel Indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal. Meskipun dalam dokumen RENSTRA 2023 – 2026 indikator kinerja ke dua Rumah Sakit tersebut belum muncul, tetapi indikator kinerja UPTD RSUD M Irsyad Djuwaeli Labuan dan UPTD RSUD Uwes Qorny Cilograng mengikuti indikator standar pelayanan minimal Rumah Sakit sesuai kelas nya yaitu Rumah Sakit tipe C, seluruh indikator kinerja tercapai 100 persen

Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan seluruh target terealisasi dengan sangat baik, hal tersebut karena :

- Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah memanfaatkan SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan) agar dapat mengetahui kekosongan tenaga kesehatan di Fasyankes khususnya di Puskesmas
- Dinas Kesehatan Provinsi Banten melalui penempatan dan pendistribusian tenaga kesehatan penugasan khusus di

UPTD RSUD Banten, UPTD RSUD Malingping dan khususnya Puskesmas di Kabupaten / Kota telah membantu kekurangan tenaga kesehatan baik dokter, perawat, apoteker maupun bidan

- Komunikasi dan koordinasi antara Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / Kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan berjalan dengan baik
- Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus juga selain bertugas di Fasyankes juga telah berperan penting dalam membantu pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat melalui pelaksanaan Mobile Klinik yang mulai beroperasi sejak tahun 2025
- Hambatan yang ditemukan dalam pencapaian target kinerja Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan adalah aturan bahwa sudah OPD tidak boleh lagi mengangkat tenaga non ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) **sehingga Dinas Kesehatan Provinsi Banten tidak dapat lagi mengangkat tenaga kesehatan penugasan khusus untuk Fasyankes primer di Kabupaten / Kota yang masih membutuhkan dukungan Provinsi dalam penyediaan tenaga kesehatan sesuai standar di Puskesmas wilayahnya**
- Pada UPTD Pelatihan Kesehatan Provinsi Banten dengan target 480 orang terealisasi 480 orang, capaian tersebut karena semakin solid nya jejaring antara Upelkes dengan pemegang program kegiatan di Kabupaten / Kota terkait peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, dilakukan peningkatan sarana prasarana yang mendukung mutu pelatihan di upelkes sehingga peserta pelatihan semakin

antusias mengikuti pelatihan di Upelkes, semakin matangnya persiapan dalam pelaksanaan pelatihan sesuai jadwal dengan target peserta yang telah ditentukan serta tingginya minat dan partisipasi peserta Pelatihan yang diselenggarakan oleh UPTD Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman tahun 2025 seluruh target terealisasi dengan sangat baik, hal tersebut karena :

- Sarana yang dibina dan di awasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam periode 2025, sehingga target dan realisasi mudah dicapai
- Kegiatan yang dilakukan mendukung percepatan pelayanan perizinan, sesuai peran Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian
- Kerjasama yang semakin baik dengan lintas sektor seperti DPMPSTSP Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Balai Besar POM di Serang
- Dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dibuat sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan regulasi terbaru.
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan tahun 2025 seluruh target terealisasi dengan sangat baik, hal tersebut karena :

- Dinas Kesehatan Provinsi Banten secara aktif dan berkesinambungan menjalin kerjasama yang solid dengan kelompok masyarakat yang telah melaksanakan kerjasama sejak tahun 2023
- Dinas Kesehatan Provinsi Banten secara pro aktif melaksanakan koordinasi yang efektif melalui *Focus Group*

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

Discussion dengan kelompok masyarakat, melibatkan organisasi profesi dan terus melaksanakan pembinaan termasuk dengan melibatkan DPRD Provinsi Banten

- Dinas kesehatan Provinsi Banten memberikan kesempatan pada organisasi masyarakat untuk mendukung program pemerintah dengan melakukan cek kesehatan gratis saat organisasi masyarakat mengadakan acara internal

3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstras Dinas Kesehatan

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target dalam rencana pembangunan jangka menengah (RENSTRA) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.23
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kesehatan (RENSTRA 2023 – 2026)**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program						
				2023	Realisasi	2024	Realisasi	2025	Realisasi	2026
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih / Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan Dinas Kesehatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		70 - 80	78,5	70 - 80	78,8	70 - 80		70 - 80
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program						
				2023	Realisasi	2024	Realisasi	2025	Realisasi	2026
			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Labkesda	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Pelatihan Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT RSUD Banten	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT RSUD Malingping	100	100	100	100	100	100	100
	Terwujudnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan Guna Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM / Meningkatkan Kualitas Layanan	Rasio Kematian Ibu dan Rasio Kematian Bayi		81 dan 4,7	75,9 dan 5	80 dan 4,6	75,40 dan 4,5	79 dan 4,5	58,26 dan 4,5	78 dan 4,4

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program						
				2023	Realisasi	2024	Realisasi	2025	Realisasi	2026
	Kesehatan Masyarakat									
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Bersiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	100	100	100	100	100	100	100
			Peningkatan jumlah parameter laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi	118 Parameter	118 Parameter	123 Parameter	126 Parameter	128 Parameter	154 Parameter	133 Parameter

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program						
				2023	Realisasi	2024	Realisasi	2025	Realisasi	2026
			Ketersediaan Fasilitas Pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu	239	252	239	261	242	261	245
			Rasio Daya Tampung RS Rujukan	0,13 rasio	0,13 rasio	0,14 rasio	0,14 rasio	0,14 rasio	0,14 rasio	0,14 rasio
			Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi	79,20	91	79,37	94,78	80,16	97,05	80,95
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							
			Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan	470 orang	470 orang	470 orang	470 orang	470 orang	470 orang	470 orang
			Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat	360 orang	360 orang	420 orang	449 orang	480 orang	480 orang	540 orang
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT	100	100	100	100	100	100	100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program						
				2023	Realisasi	2024	Realisasi	2025	Realisasi	2026
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							
			Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	13 kel masy	13 kel masy	14 kel masy	14 kel masy	15 kel masy	15 kel masy	16 kel masy
		Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting		40%	66,6%	50%	75%	60%	83,3%	70%
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
			Cakupan Kualitas Keluarga Sehat	57%	78,5%	57%	87%	64%	81,25%	64%
			Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban)	86%	90,6%	86%	94%	90%	95,73%	90%
	Terwujudnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan Guna Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM / Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan		76,92	76,93	92,31	92,31	100	100	100
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program						
				2023	Realisasi	2024	Realisasi	2025	Realisasi	2026
			Persentase standar bagian pelayanan sebagai RS pendidikan	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase standar bagian pelayanan keperawatan sebagai RS pendidikan Persentase standar	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase standar bagian pelayanan medis sebagai RS pendidikan	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase standar bagian penunjang sebagai RS pendidikan	50	50	100	100	100	100	100
			Persentase Standar Bagian Penunjang Logistik Sebagai RS Pendidikan	50	50	100	100	100	100	100
			Persentase standar bagian penunjang Rekam Medis dan SIM RS sebagai RS pendidikan	50	50	100	100	100	100	100
		Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit		100	100	100	100	100	100	100
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
			Capaian variabel indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100	100	100	100	100	100	100

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program						
				2023	Realisasi	2024	Realisasi	2025	Realisasi	2026
			Capaian variabel indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100	100	100	100	100	100	100
			Capaian variabel indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100	100	100	100	100	100	100

Jika dibandingkan dengan tujuan dan sasaran kinerja pada Dokumen RENSTRA, hanya indikator sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang belum terdapat realisasi / capaian sasaran, hal tersebut dikarenakan nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2025 masih harus menunggu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 dan penilaian dari Inspektorat Provinsi Banten yang akan diumumkan pada bulan Maret atau April tahun 2026. Capaian sasaran dan kinerja Program pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan target tahun 2025 dalam dokumen RENSTRA Tahun 2023 – 2026 tercapai seluruhnya, hal tersebut menunjukkan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sudah sangat baik.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

Tabel 3.24
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kesehatan (RENSTRA 2025 – 2029)

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program						
				2025	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Penemuan Kasus Tuberkulosis	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage - %)		95	111,9	95	95	95	95	95
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Indeks Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan Induk, UPTD Labkesda Provinsi Banten, UPTD Pelatihan Kesehatan Provinsi Banten)	74		80	83	85	87	90
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
			Persentase Ketercapaian angka keberhasilan pengobatan tuberculosis, presentase hipertensi dalam pengendalian, dan diabetes melitus dalam pengendalian	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	76	91,11	76	77	78	78,5	79
			Persentase Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan STBM	37,5	62,5	50	62,5	62,5	75	75

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program						
				2025	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatnya Cakupan 9 Layanan Intervensi Stunting	Persentase Cakupan 9 Layanan Intervensi dalam Penurunan Stunting		62	100	66	70	74	77	77
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
			Persentase Tercapainya Cakupan Layanan Intervensi dalam Penurunan Stunting	64	83,3	65	72	76	77	77,7
			<u>Cakupan imunisasi bayi lengkap</u>	75	104,8	80	82,5	85	87,5	90
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							
			Persentase masyarakat yang mengimplementasikan PHBS	65,22	90	69,57	73,91	78,26	82,61	86,96
	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)		101	58,26	94	84	74	64	63
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
			Persentase Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program						
				2025	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
			Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi							
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Bersiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terkreditasi	91	97,05	92	93	94	95	95
			Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,91	1,36	0,92	0,93	0,94	0,95	0,95
			Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan sesuai standar	97	100	97	97	97	97	97
			Persentase Penderita gangguan jiwa dan Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pengobatan dan tidak diterlantarkan	100	100	100	100	100	100	100
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	98,77	100	98,77	98,77	98,77	99,00	99,00
			Persentase kualitas pelayanan kesehatan primer sesuai standar	71,5	83	82,00	98,00	100	100	100
			persentase Ibu Bersalin melakukan persalinan di fasilitas kesehatan	80	104,3	82	84	86	88	88
			Persentase Ketercapaian Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	50	100	50	60	65	70	70

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program						
				2025	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
			Persentase Masyarakat yang memahami GERMAS	65	97	70	75	80	85	90
			Persentase pemanfaatan Fungsi Labkesmas Tingkat III	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	75	75
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							
			Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis di Kabupaten/Kota Sesuai Standar	12,5	12,5	12,5	12,5	25	25	37,5
			Persentase SDM Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai standar	25	25	30	35	40	45	50
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							
			Persentase sarana Kefarmasian Tingkat Provinsi yang memenuhi syarat	75	77,5	76	79	80	82	84
	Meningkatnya 4 (empat) Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi pada RS Rujukan Regional Provinsi	Persentase 4 (empat) Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi yang Berklasifikasi Utama		25	25	25	50	50	75	75
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program						
				2025	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
			Indeks Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah (UPTD RSUD Banten, UPTD RSUD Malingping, UPTD RSUD M Irsyad Djuwaeli Labuan, UPTD RSUD Uwes Qorny Cilograng)	74		80	83	85	87	90
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
			Persentase sarana dan prasarana RSUD Banten sesuai standar yang terpenuhi	65	65	70	70	75	90	100
			Nilai Akreditasi RSUD Banten	80	80	80	80	81	81	81
			Persentase digitalisasi layanan kesehatan di RSUD Banten	75	75	75	80	85	90	100
			Persentase Pengembangan Fasilitas Layanan Kesehatan UPTD RSUD Malingping	80	80	83	83	83	88	100
			Jumlah SPM Sub Variabel Kegawat daruratan UPTD RSUD Malingping	1	1	2	4	6	7	8
			Persentase digitalisasi layanan kesehatan di RSUD Malingping	50	50	60	70	80	90	100
			Nilai Akreditasi RSUD Labuan	60	60	60	60	60	60	61
			Persentase digitalisasi layanan Kesehatan RSUD Labuan	50	71,42	60	70	80	90	100

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program						
				2025	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
			Jumlah SPM Sub Variabel Kegawat daruratan UPTD RSUD Labuan	1	1	2	4	6	7	8
			Nilai Akreditasi RSUD Cilograng	60	60	60	60	60	60	61
			Persentase digitalisasi layanan Kesehatan RSUD Cilograng	50	85,71	60	70	80	90	100
			Jumlah SPM Sub Variabel Kegawat daruratan UPTD RSUD Cilograng	1	1	2	4	6	7	8

3.1.4. Membandingkan Realiasi Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Nasional

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan secara optimal diharapkan dapat mencapai sasaran daerah yaitu Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat. Menurut data yang dirilis oleh BPS Provinsi Banten, untuk Tahun 2025 data UHH Provinsi Banten berada pada angka yakni 75,53. Angka ini meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana diketahui UHH Provinsi Banten pada tahun 2024 hanya sebesar 74,97. Angka ini cenderung signifikan kenaikannya, hal ini dapat mencerminkan bahwa telah terjadi peningkatan pembangunan bidang Kesehatan di Provinsi Banten. Berikut adalah rincian UHH masing-masing Kabupaten/kota:

**Tabel 3.25
Umur Harapan Hidup Provinsi Banten**

Kab/Kota	2024	2025
Kab. Lebak	73,99	74,30
Kab. Pandeglang	74,22	74,56
Kab. Serang	74,91	75,39
Kab. Tangerang	75,34	75,63
Kota Serang	75,31	75,63

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

Kab/ Kota	2024	2025
Kota Cilegon	75,03	75,45
Kota Tangerang	75,50	75,86
Kota Tangsel	75,80	76,09
Provinsi	74,97	75,33

Sumber; BPS Prov. Banten

Tabel 3.26
Perbandingan Capaian Indikator Tujuan Daerah dengan
Capaian Nasional

Indikator Kinerja	Prov Banten	Indonesia
Umur Harapan Hidup	75,33	74,47

Sumber; BPS Prov. Banten Tahun 2025

Umur Harapah Hidup Provinsi Banten pada tahun 2025 sebesar 75,33 telah berhasil melampaui dengan Angka Harapan Hidup rata- rata Nasional yaitu sebesar 74,47. Untuk dapat meningkatkan kualitas akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan di wilayah Provinsi Banten.

Meski demikian, pada Tahun 2025 ini Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah berhasil mengoperasikan 2 Rumah Sakit Baru di Banten Selatan, yaitu RSUD Ciligrang dan RSUD Labuan yang diharapkan dapat meningkatkan akses dan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat Banten khususnya wilayah Banten Selatan. Sehingga angka kesakitan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular dapat diturunkan; dan jumlah kematian ibu dan kematian bayi dapat menurun.

Promosi Kesehatan harus lebih gencar lagi dilakukan khususnya terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) agar Masyarakat Banten memiliki budaya hidup sehat untuk mengurangi ancaman terjangkitnya penyakit menular dan tidak menular, serta pemberian ASI eksklusif kepada Bayi dan pemberian imunisasi lengkap merupakan kebutuhan dasar yang bersifat wajib bagi

keberlangsungan hidup anak.

Dalam rangka meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Banten selain faktor bidang Kesehatan, diperlukan struktur ekonomi yang Tangguh yang tercermin dalam pertumbuhan ekonomi daerah, factor inflasi yang dapat ditekan, angka pengangguran yang rendah, angka kemiskinan yang rendah, factor Pendidikan masyarakat yang tinggi dan kondisi lingkungan yang memadai. Angka harapan hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk disuatu wilayah.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari hasil Analisa laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025 sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, maka dapat dinyatakan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah berhasil mencapai target dan tujuan organisasi.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja tidak terlepas dari factor internal dan eksternal organisasi. Adapun factor internal dan eksternal keberhasilan tersebut antara lain disebabkan oleh:

- a. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan;
- b. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan untuk kinerja tahun 2025;
- c. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai;
- d. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis

- kinerja, setiap anggaran yang telah dikeluarkan dapat menghasilkan kinerja yang optimal;
- e. Telah dilakukannya evaluasi perbulan atas pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi keuangan maupun realisasi fisiknya, hal ini dimungkinkan untuk dapat melakukan perbaikan apabila terdapat kegiatan yang tidak focus pada hasil;
 - f. Optimalnya koordinasi dengan berbagai *stakeholder* baik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Vertikal teknis, OPD teknis mitra Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi maupun Organisasi Masyarakat dan Masyarakat secara luas. Sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran;
 - g. Yang terpenting adalah adanya sinergitas program/kegiatan baik antara Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten maupun dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan
 - h. Kualitas dan kompetensi SDM yang semakin meningkat menjadi kekuatan potensial untuk menghasilkan kinerja yang optimal.

Selain factor penunjang keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja, tentu ada factor yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan program yang tentu saja dapat memengaruhi pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan. Data jumlah kelahiran hidup yang proses kelahirannya bukan di fasilitas pelayanan Kesehatan masih sulit didapatkan. Diperlukan kerja sama dengan Disdukcapil dan BPS dalam menghitung jumlah kelahiran hidup tiap tahunnya.

3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program / kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan efisiensi sumber daya manusia. Persentase sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100 \% - \frac{[\text{Realisasi Biaya} \times 100\%]}{\text{Target Biaya}}$$

Pada tahun 2025 realisasi biaya untuk seluruh program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah Rp. 1.063.380.679.497,00, sementara target biaya untuk seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 1.071.638.341.515,00. Dengan rumus efisiensi di atas, diperoleh Persentase Efisiensi Biaya pada level program adalah 0,77%.

Dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi menggunakan tenaga ahli yaitu Tim Pengelolaan Website Media Sosial Siniar (*Podcast*) sehingga masyarakat lebih memahami promosi publikasi atau edukasi yang disampaikan, kerjasama tenaga ahli dari Organisasi Profesi seperti PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi) untuk melaksanakan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau efeknya langsung dirasakan masyarakat khususnya dalam pengentasan stunting di Provinsi Banten.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Urusan kesehatan yang merupakan urusan wajib yang pelaksanaannya dibagi bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota merupakan hal saling mempengaruhi, oleh karena itu capaian program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten tidak lepas dari peran serta Pusat dan Kabupaten / Kota. Dukungan Pusat (Kementerian Kesehatan RI) dalam hal memberikan masukan terkait pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam bantuan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

kepada Dinas Kesehatan Provinsi Banten sangat membantu dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan, sedangkan pelaksanaan SPM Kesehatan di Kabupaten / Kota dan keaktifan dalam pelaporan juga mempengaruhi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam mencapai sasaran OPD dan kinerja program sesuai dengan target

3.2. Realisasai Anggaran

Pagu murni Dinas Kesehatan APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.146.501.494.865,00 berkurang sebesar Rp. 38.106.450.166,00 pada Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 1.071.638.341.515,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.27
Alokasi Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2025**

No	Keterangan	Pagu Murni	+ / (-)	Pagu Perubahan
1	Dinas Induk	563.866.749.634,00	(385.783.525,00)	536.427.049.788,00
2	UPTD Pelatihan Kesehatan	6.928.988.384,00	(5.223.871.100)	1.705.117.284,00
3	UPTD LABKESDA	18.000.000.000,00	(107.350.000,00)	17.280.981.946,00
4	RSUD Malingping	101.878.491.911,00	(150.494.925,00)	105.283.782.839,00
5	RSUD Banten	304.978.225.888,00	(12.942.023.260,00)	292.036.202.628,00
6	RSUD Ciligrang	76.322.688.078,00	(127.938.600,00)	63.547.844.816,00
7	RSUD Labuan	74.526.350.970,00	(19.168.988.756)	55.357.362.214,00
	Jumlah Pagu	1.146.501.494.865,00	(38.106.450.166,00)	1.071.638.341.515,00

Sumber; Data diolah

**Tabel 3.28
Realisasi Belanja Tahun 2025**

OPD	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
DINKES	536.427.049.788	533.894.447.579,00	2.532.602.209,00	99,53
PELKES	1.705.117.284	1.601.756.641	103.360.643	93,94
LABKESDA	17.280.981.946	16.998.432.788	282.549.158	98,36
RSUD BANTEN (APBD)	72.419.686.300	71.390.371.899	1.029.314.401	98,58
RSUD BANTEN (BLUD)	219.616.516.328	219.437.625.064	178.891.264	99,92

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

OPD	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
RSUD MALINGPING (APBD)	51.129.132.161	50.364.395.092	764.737.069	98,50
RSUD MALINGPING (BLUD)	54.154.650.678	54.154.395.905	254.773	100,00
RSUD MUHAMMAD IRSYAD DJUWAEI LABUAN (APBD)	48.357.362.214	46.508.415.735	1.848.946.480	96,18
RSUD MUHAMMAD IRSYAD DJUWAEI LABUAN (BLUD)	7.000.000.000	6.983.710.608	16.289.392	99,77
RSUD UWES QORNY CILOGRANG (APBD)	59.547.844.816	58.047.587.001	1.500.257.815	97,48
RSUD UWES QORNY CILOGRANG (BLUD)	4.000.000.000	3.999.541.185	458.815	99,99
JUMLAH	1.071.638.341.515	1.063.380.679.497	8.257.662.018	99,23

Sumber; Data diolah

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

**Tabel 3.29
Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Tahun 2025**

A. Dinas Kesehatan (Induk)

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	TOTAL REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	55.454.408.019,00	54.484.435.876,00	(969.972.143,00)	98,25
2	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	577.846.200,00	547.322.960,00	(30.523.240,00)	94,72
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	245.119.000,00	227.164.814,00	(17.954.186,00)	92,68
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6.910.000,00	6.140.000,00	(770.000,00)	88,86
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.430.000,00	6.428.890,00	(1.110,00)	99,98
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.990.000,00	9.973.785,00	(16.215,00)	99,84
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.977.200,00	10.954.183,00	(23.017,00)	99,79
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.600.000,00	24.480.376,00	(119.624,00)	99,51
9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	209.081.000,00	199.901.912,00	(9.179.088,00)	95,61
10	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	37.170.000,00	34.710.000,00	(2.460.000,00)	93,38
11	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.569.000,00	27.569.000,00	0,00	100,00
12	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	34.139.339.619,00	33.757.432.156,00	(381.907.463,00)	98,88
13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.430.335.219,00	33.053.664.790,00	(376.670.429,00)	98,87
14	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	689.736.000,00	684.608.000,00	(5.128.000,00)	99,26

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

15	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.178.800,00	6.142.470,00	(36.330,00)	99,41
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.273.600,00	12.204.731,00	(68.869,00)	99,44
17	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	816.000,00	812.165,00	(3.835,00)	99,53
18	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	50.000.000,00	41.450.000,00	(8.550.000,00)	82,90
19	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000,00	16.560.000,00	(3.440.000,00)	82,80
20	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	8.330.000,00	(1.670.000,00)	83,30
21	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000,00	16.560.000,00	(3.440.000,00)	82,80
22	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	105.250.000,00	104.750.000,00	(500.000,00)	99,52
23	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	105.250.000,00	104.750.000,00	(500.000,00)	99,52
24	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.994.395.000,00	1.807.649.929,00	(186.745.071,00)	90,64
25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	109.409.000,00	107.015.100,00	(2.393.900,00)	97,81
26					
27	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	439.571.200,00	434.775.260,00	(4.795.940,00)	98,91
28	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	273.995.800,00	203.807.260,00	(70.188.540,00)	74,38
29	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	685.186.000,00	676.645.340,00	(8.540.660,00)	98,75
30	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.163.000,00	150.103.230,00	(59.770,00)	99,96
31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	312.930.000,00	212.926.583,00	(100.003.417,00)	68,04
32	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	23.140.000,00	22.377.156,00	(762.844,00)	96,70
33	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	8.271.072.000,00	8.132.469.586,00	(138.602.414,00)	98,32
34	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.738.000.000,00	4.715.800.001,00	(22.199.999,00)	99,53
35					
36	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.533.072.000,00	3.416.669.585,00	(116.402.415,00)	96,71
37	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.416.590.200,00	7.341.898.969,00	(74.691.231,00)	98,99
38	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	945.089.042,00	922.414.617,00	(22.674.425,00)	97,60
39	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.471.501.158,00	6.419.484.352,00	(52.016.806,00)	99,20

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

40	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.899.915.000,00	2.751.462.276,00	(148.452.724,00)	94,88
41	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.176.000,00	80.176.000,00	0,00	100,00
42	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.163.196.000,00	1.131.337.020,00	(31.858.980,00)	97,26
43	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	403.515.000,00	344.045.950,00	(59.469.050,00)	85,26
44	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	770.000.000,00	768.808.000,00	(1.192.000,00)	99,85
45	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	216.376.000,00	175.948.000,00	(40.428.000,00)	81,32
46	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	266.652.000,00	251.147.306,00	(15.504.694,00)	94,19
47	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	459.548.370.513,00	458.710.983.979,00	(837.386.534,00)	99,82
48	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	60.341.464.093,00	60.174.762.197,00	(166.701.896,00)	99,72
49	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	816.790.000,00	816.790.000,00	0,00	100,00
51	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	59.524.674.093,00	59.357.972.197,00	(166.701.896,00)	99,72
52	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	382.497.505.020,00	381.896.809.763,00	(600.695.257,00)	99,84
53	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	452.646.000,00	325.985.754,00	(126.660.246,00)	72,02
54	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	202.900.000,00	202.579.503,00	(320.497,00)	99,84
55	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.000.797.000,00	1.000.718.393,00	(78.607,00)	99,99
56	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	30.892.000,00	30.892.000,00	0,00	100,00
57	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	781.440.000,00	781.435.908,00	(4.092,00)	100,00
58	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	574.681.000,00	539.542.431,00	(35.138.569,00)	93,89

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

59	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.102.577.000,00	1.010.761.484,00	(91.815.516,00)	91,67
60	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	721.888.600,00	721.830.005,00	(58.595,00)	99,99
61	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.198.172.000,00	2.003.200.539,00	(194.971.461,00)	91,13
62	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	37.255.600,00	37.255.600,00	0,00	100,00
63	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	718.743.000,00	714.910.857,00	(3.832.143,00)	99,47
64	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	124.558.000,00	124.545.811,00	(12.189,00)	99,99
65	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	370.899.917.620,00	370.876.629.243,00	(23.288.377,00)	99,99
66	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	154.551.000,00	154.244.800,00	(306.200,00)	99,80
67	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1.792.431.000,00	1.703.285.825,00	(89.145.175,00)	95,03
68	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1.115.732.200,00	1.081.960.109,00	(33.772.091,00)	96,97
69	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	228.097.000,00	227.620.911,00	(476.089,00)	99,79
70	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	360.226.000,00	359.410.590,00	(815.410,00)	99,77
71	PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS B DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	16.709.401.400,00	16.639.412.019,00	(69.989.381,00)	99,58
72	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	270.782.000,00	270.254.972,00	(527.028,00)	99,81
73	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	16.438.619.400,00	16.369.157.047,00	(69.462.353,00)	99,58
74	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	19.354.392.256,00	18.638.024.983,00	(716.367.273,00)	96,30
75	PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP PROVINSI	19.354.392.256,00	18.638.024.983,00	(716.367.273,00)	96,30
76	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	19.289.297.256,00	18.572.929.983,00	(716.367.273,00)	96,29
77	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	65.095.000,00	65.095.000,00	0,00	100,00
78	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.096.897.000,00	1.092.604.928,00	(4.292.072,00)	99,61
79	PENERBITAN PENGAKUAN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) CABANG DAN CABANG PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK)	978.689.800,00	974.407.703,00	(4.282.097,00)	99,56

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

80	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	978.689.800,00	974.407.703,00	(4.282.097,00)	99,56
81	PENERBITAN IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL (UKOT)	118.207.200,00	118.197.225,00	(9.975,00)	99,99
82	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	118.207.200,00	118.197.225,00	(9.975,00)	99,99
83	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	972.982.000,00	968.397.813,00	(4.584.187,00)	99,53
84	ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH PROVINSI	620.902.000,00	617.539.420,00	(3.362.580,00)	99,46
85	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	620.902.000,00	617.539.420,00	(3.362.580,00)	99,46
86	PELAKSANAAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH PROVINSI	352.080.000,00	350.858.393,00	(1.221.607,00)	99,65
87	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	352.080.000,00	350.858.393,00	(1.221.607,00)	99,65
	JUMLAH BELANJA DAERAH	536.427.049.788,00	533.894.447.579,00	(2.532.602.209,00)	99,53
	SURPLUS / (DEFISIT)	(534.677.049.788,00)	(531.764.981.579,00)	2.912.068.209,00	99,46

B. UPTD PELAYANAN KESEHATAN

No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	TOTAL REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	991.037.284,00	972.010.871,00	(19.026.413,00)	98,08
1	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	182.173.600,00	177.987.844,00	(4.185.756,00)	97,70
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.066.600,00	6.976.905,00	(89.695,00)	98,73
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.870.000,00	57.582.644,00	(287.356,00)	99,50

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJI-P)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.889.000,00	21.047.820,00	(1.841.180,00)	91,96
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.830.000,00	22.770.000,00	(60.000,00)	99,74
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.360.000,00	11.180.475,00	(179.525,00)	98,42
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.158.000,00	58.430.000,00	(1.728.000,00)	97,13
B	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	188.684.684,00	187.201.500,00	(1.483.184,00)	99,21
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	188.684.684,00	187.201.500,00	(1.483.184,00)	99,21
C	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	482.041.000,00	471.638.732,00	(10.402.268,00)	97,84
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.864.000,00	110.530.164,00	(333.836,00)	99,70
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	371.177.000,00	361.108.568,00	(10.068.432,00)	97,29
D	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	138.138.000,00	135.182.795,00	(2.955.205,00)	97,86
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.977.000,00	85.223.795,00	(2.753.205,00)	96,87
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.959.000,00	49.959.000,00	0,00	100,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	202.000,00	0,00	(202.000,00)	0,00
E	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	714.080.000,00	629.745.770,00	(84.334.230,00)	88,19
	PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	714.080.000,00	629.745.770,00	(84.334.230,00)	88,19
1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	646.435.000,00	564.530.770,00	(81.904.230,00)	87,33
2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	67.645.000,00	65.215.000,00	(2.430.000,00)	96,41
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.705.117.284,00	1.601.756.641,00	(103.360.643,00)	93,94

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJI-P)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

C. UPTD LABKESDA

No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	TOTAL REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.279.517.252,00	8.197.777.686,00	(81.739.566,00)	99,01
1	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	134.398.000,00	134.255.014,00	(142.986,00)	99,89
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	134.398.000,00	134.255.014,00	(142.986,00)	99,89
2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	484.369.000,00	483.277.802,00	(1.091.198,00)	99,77
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.351.000,00	19.327.309,00	(23.691,00)	99,88
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	279.079.000,00	278.351.740,00	(727.260,00)	99,74
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.920.000,00	130.756.600,00	(163.400,00)	99,88
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.299.000,00	53.122.153,00	(176.847,00)	99,67
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	100,00
3	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.490.300.000,00	2.466.930.630,00	(23.369.370,00)	99,06
	Pengadaan Mebel	627.184.000,00	616.464.774,00	(10.719.226,00)	98,29
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.337.947.000,00	1.331.677.956,00	(6.269.044,00)	99,53
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	212.056.000,00	211.095.720,00	(960.280,00)	99,55
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	313.113.000,00	307.692.180,00	(5.420.820,00)	98,27
4	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.797.499.252,00	3.740.866.240,00	(56.633.012,00)	98,51
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	581.299.372,00	571.161.772,00	(10.137.600,00)	98,26
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.216.199.880,00	3.169.704.468,00	(46.495.412,00)	98,55
5	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.372.951.000,00	1.372.448.000,00	(503.000,00)	99,96

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	288.760.000,00	288.257.000,00	(503.000,00)	99,83
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.457.000,00	179.457.000,00	0,00	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	769.305.000,00	769.305.000,00	0,00	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	135.429.000,00	135.429.000,00	0,00	100,00
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	9.001.464.694,00	8.800.655.102,00	(200.809.592,00)	97,77
1	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	9.001.464.694,00	8.800.655.102,00	(200.809.592,00)	97,77
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.406.774.120,00	1.269.630.702,00	(137.143.418,00)	90,25
	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	2.389.965.000,00	2.361.027.165,00	(28.937.835,00)	98,79
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	2.295.526.000,00	2.267.865.106,00	(27.660.894,00)	98,80
	Pemeliharaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	485.315.000,00	479.589.000,00	(5.726.000,00)	98,82
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.423.884.574,00	2.422.543.129,00	(1.341.445,00)	99,94
	JUMLAH BELANJA DAERAH	17.280.981.946,00	16.998.432.788,00	(282.549.158,00)	98,36

D. RSUD BANTEN

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	TOTAL REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	102.933.782.839,00	102.344.477.943,00	(589.304.896,00)	99,43
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33..597.402.067,00	33.112.352.777,00	(485.049.290,00)	98,56
3	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahab Daerah	15.181.730.094,00	15.077.729.261,00	(104.000.833,00)	99,31
4	Peningkatan Pelayanan Blud	54.154.650.678,00	54.154.395.905,00	(254.773,00)	100,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.350.000.000,00	2.174.313.054,50	(175.686.945,50)	92,52
5	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.350.000.000,00	2.174.313.054,50	(175.686.945,50)	92,52
	JUMLAH BELANJA DAERAH	105.283.782.839,00	104.518.790.997,50	764.991.841,50)	99,27

E. RSUD MALIMPING

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	TOTAL REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
				JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	102.933.782.839,00	102.344.477.943,00	589.304.896,00	99,43
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.597.402.067,00	33.112.352.777,00	485.049.290,00	98,56
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.181.730.094,00	15.077.729.261,00	104.000.833,00	99,31
3	Peningkatan Pelayanan BLUD	54.154.650.678,00	54.154.395.905,00	254.773,00	99,9995
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.350.000.000,00	2.174.313.054,50	175.686.945,50	92,52
4	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.350.000.000,00	2.174.313.054,50	175.686.945,50	92,52
	JUMLAH BELANJA DAERAH	105.283.782.839,00	104.518.790.997,50	764.991.841,50	99,27

F. RSUD CILOGRANG

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	TOTAL REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
			TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	44.179.521.832,00	43.098.393.685,00	(1.081.128.147,00)	97,55

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.530.000,00	10.521.290,00	(8.710,00)	99,92
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.597.130.376,00	882.983.000,00	(714.147.376,00)	55,29
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.400.000,00	87.399.144,00	(856,00)	100,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.799.908.700,00	1.774.297.085,00	(25.611.615,00)	98,58
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.093.426.429,00	2.054.004.838,00	(39.421.591,00)	98,12
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.749.060.327,00	31.553.958.110,00	(195.102.217,00)	99,39
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.842.066.000,00	2.735.689.033,00	(106.376.967,00)	96,26
8	Peningkatan Pelayanan Blut	4.000.000.000,00	3.999.541.185,00	(458.815,00)	99,99
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	19.368.322.984,00	18.948.734.501,28	(419.588.482,72)	97,83
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	17.597.322.984,00	17.234.062.001,28	(363.260.982,72)	97,94
2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.771.000.000,00	1.714.672.500,00	(56.327.500,00)	96,82
	JUMLAH BELANJA DAERAH	63.547.844.816,00	62.047.128.186,28	(1.500.716.629,72)	97,64

G. RSUD LABUAN

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	TOTAL REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
			TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.647.447.819,00	40.968.586.820,50	(1.678.860.998,50)	96,06
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.820.000,00	8.787.072,00	(32.928,00)	99,63
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.863.120.363,00	1.160.370.392,00	(702.749.971,00)	62,28
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.400.000,00	86.400.000,00	(1.000.000,00)	98,86
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.869.850.600,00	1.757.570.977,00	(112.279.623,00)	94,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	672.028.700,00	642.398.561,00	(29.630.139,00)	95,59

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.230.246.156,00	28.436.694.396,00	(793.551.760,00)	97,29
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.915.982.000,00	1.892.654.814,50	(23.327.185,50)	98,78
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	7.000.000.000,00	6.983.710.608,00	(16.289.392,00)	99,77
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	12.709.914.395,00	12.523.539.522,00	(186.374.873,00)	98,53
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	12.709.914.395,00	12.523.539.522,00	(186.374.873,00)	98,53
	JUMLAH BELANJA DAERAH	55.357.362.214,00	53.508.415.734,50	(1.848.946.479,50)	96,66

Sumber; Data diolah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada Tahun anggaran 2025 melaksanakan 17 Program, 49 kegiatan, 177 Sub Kegiatan serta 4 kegiatan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) pada RSUD Uwes Qorny Ciligrang, RSUD Muhammad Irsyad Djuwaeli Labuan, RSUD Malingping dan RSUD Banten. Dengan Anggaran APBD Perubahan sebesar **Rp. 1.071.638.341.515,00** dengan realisasi anggaran sebesar **99,23%** atau sebesar **Rp. 1.063.380.679.497,00**. Berikut ini disampaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan pada Tahun Anggaran 2025 dan solusi untuk tahun anggaran berikutnya pada Sub Kegiatan dengan kinerja keuangan kurang dari 90%:

1. UPTD Pelatihan Kesehatan

Sementara itu, pada UPTD Pelayanan Kesehatan, terdapat sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang tidak terealisasi sama sekali (0,00%), karena adanya efisiensi anggaran.

2. Rumah Sakit Umum Daerah

Kinerja keuangan di bawah 90% juga ditemukan pada unit rumah sakit, yaitu pada **RSUD Ciligrang** dan **RSUD Labuan**, di mana keduanya memiliki kendala pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian masing-masing sebesar 55,29% dan 62,28%.

Pertama, pada UPTD RSUD MID labuan yang dibawah 90% pada kegiatan Administrasi Keuangan dikarenakan belum tersedianya pegawai ASN di UPTD RSUD MID Labuan, saat ini hanya tersedia ASN pejabat struktural dan satu ASN Fungsional di UPTD RSUD MID Labuan. Adapun untuk honorarium di UPTD RSUD MID Labuan Hanya tersedia dan dilaksanakan beberapa honorarium saja dari semua honorarium yang ada, sehingga anggaran untuk kegiatan administrasi keuangan tidak terserap seluruhnya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2025. Capaian Kinerja (*performance result*) Tahun 2025 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisa atas capaian kinerja tahun 2025 dapat dijadikan sebagai untuk perbaikan kinerja organisasi di masa akan datang.

Penilaian Kinerja Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Banten sesuai dengan perhitungan Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi mendapatkan nilai 91,38 dan masuk dalam kategori BAIK. Yang artinya Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten sudah sangat baik dan sesuai dengan ekspektasi.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Meski secara umum kinerja Dinas Kesehatan masuk dalam kategori sangat baik, namun masih terdapat tantangan dan perlu dilakukan perbaikan di masa yang akan datang. Langkah-langkah rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Terus berupaya mempertahankan dan memperbaiki kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan
2. Melakukan koordinasi internal yang intensif agar terdapat perbaikan kinerja

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

3. Melakukan koordinasi dengan OPD mitra terkait capaian kinerja PD yang bersinggungan dengan OPD lainnya agar capaian kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatnya

Demikian yang dapat Kami susun, semoga Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2025 dapat mendukung dalam penyusunan LKjIP Pemerintah Provinsi Banten.



DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani, Desa Margaya, Kec. Curug,
Kota Serang - Provinsi Banten



www.dinkes.bantenprov.go.id



[dinkes_provbanten](https://www.instagram.com/dinkes_provbanten)

LAMP IRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. dr. Hj. ATI PRAMUDJI HASTUTI, M.A.R.S**

Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. DAMENTA**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

A. DAMENTA

Serang, Januari 2025
Pihak Pertama,

Dr. dr. Hj. ATI PRAMUDJI HASTUTI, M.A.R.S
NIP. 19730815 200312 2 005

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting	Persen	21,3
		Rasio Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Rasio	79
		Rasio Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	Rasio	4,5
3	Meningkatkan Akses dan Mulu Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	Persen	100
4	Meningkatkan Akses dan Mulu Pelayanan Kesehatan	Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	Persen	100

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	289.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	277.227.145.800
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.772.854.200
	JUMLAH	289.000.000.000

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/ PROGRAM	ANGGARAN
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.146.543.434.865
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	585.535.382.042
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	529.730.787.967
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	28.484.511.856
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.447.579.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.345.174.000
	JUMLAH	1.146.543.434.865

Pj. GUBERNUR BANTEN,



A. DAMENTA

KEPALA DINAS KESEHATAN,



Dr. dr. Hj. ATI PRAMUDJI HASTUTI, M.A.R.S
NIP. 19730815 200312 2 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. dr. Hj. ATI PRAMUDJI HASTUTI, M.A.R.S.**

Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDRA SONI**

Jabatan : **GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

ANDRA SONI



Setang, 4 November 2025

Pihak Pertama,

Dr. dr. Hj. ATI PRAMUDJI HASTUTI, M.A.R.S.
NIP. 19730815 200312 2 005

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	277.500.000.000	PAPBD
4.1.02	Retribusi Daerah	275.676.000.000	PAPBD
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.824.000.000	PAPBD
	JUMLAH	277.500.000.000	

BELANJA DAERAH

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.071.638.341.515	PAPBD
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	544.169.417.673	PAPBD
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	505.330.572.586	PAPBD
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	20.068.472.256	PAPBD
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.096.897.000	PAPBD
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	972.982.000	PAPBD
	JUMLAH	1.071.638.341.515	

GUBERNUR BANTEN,



ANDRA SONI

KERALA DINAS KESEHATAN,



Dr. dr. H. ATI PRAMUDJI HASTUTI, M.A.R.S.
NIP. 19730815 200312 2 005

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Penemuan Kasus Tuberkulosis	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkolosis (treatment coverage)	Persen	95
2	Meningkatnya Cakupan 9 Layanan Intervensi Stunting	Persentase Cakupan 9 Layanan Intervensi dalam Penurunan Stunting	Persen	62
3	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	101
4	Meningkatnya 4 layanan unggulan kesehatan dengan sistem rujukan berbasis kompetensi	Persentase 4 Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi yang Berklasifikasi Utama	Persen	25



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang Banten Telepon (0254) 7039946, Faksimile (0254) 267041

Laman www.inspektorat.bantenprov.go.id, Pos-el inspektorat@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, 24 Februari 2026

Inspektur Daerah,



Dr. Dra. H. Siti Ma'ani Nina, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19681012 198803 2 003

Capaian Kategori Provinsi Terbaik dalam Capaian Indikator Tuberkulosis



Penghargaan Dalam Capaian Triple Eliminasi HIV

